

**PERSETUJUAN PERNIKAHAN WANITA  
MENURUT PEMIKIRAN IBNU RUSYD**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana (s1)  
Pada Konsentrasi Hukum Islam Yang Telah Ditetapkan Oleh  
UIN SUSKA Riau.**



**Disusun Oleh :**

**DODY MUAMMAR JABBAR**  
**10821004766**

**PROGRAM SI  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan transaksi (akad) yang istimewa dalam Islam melebihi transaksi lainnya semisal jual beli. Oleh karenanya ketika akan melakukan perkawinan tersebut perlu pertimbangan yang matang dan pemenuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang mendukung tercapainya tujuan perkawinan. Salah satu ketentuan yang diharapkan dapat membawa kepada tercapainya tujuan perkawinan tersebut adalah adanya persetujuan atau kebebasan anak gadis dalam menentukan calon suaminya.

Lebih lanjut tentang adanya persetujuan anak gadis tersebut, ternyata di kalangan *fuqaha'* terjadi perbedaan pendapat. Hal ini diindikasikan dengan terpecah mereka kepada dua kubu. Kubu pertama menyatakan bahwa persetujuan hukumnya hanya sekedar sunat, tanpa ada persetujuan pun, perkawinan tetap sah. Sedangkan kubu lain berpendapat persetujuan adalah sesuatu yang menentukan (wajib). Artinya apabila persetujuan tidak ada, maka perkawinan batal alias tidak sah. Pada golongan pertama termasuk imam Syafi'i yang mana pendapatnya diikuti mayoritas masyarakat Indonesia. Sedangkan di golongan kedua diikuti oleh Ibnu Rusyd yang juga merupakan salah satu tokoh besar dalam dunia Islam.

Perbedaan pendapat di antara Ibnu Rusyd dengan mayoritas *fuqaha'* merupakan sebuah fenomena yang menarik untuk dikaji. Hal tersebut memberikan kesempatan kepada penyusun untuk membuka tabir bagaimana sesungguhnya pemikiran Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan wanita. Disamping itu, untuk menyempurnakan penelitian ini penyusun mencoba menemukan landasan pemikiran Ibnu Rusyd dan metode yang digunakannya dalam mengistinbatkan hukum akan masalah persetujuan pernikahan ini.

Dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*), oleh karena itu penyusun dalam mendekati persoalan ini menggunakan metode analisis deskriptif, analisis komparasi, dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Ibnu Rusyd berpendapat bahwa wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan adalah wanita dewasa, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya, akan tetapi berbeda status hukumnya dengan gadis yang masih kecil.

Berdasarkan metode yang digunakan akhirnya bisa dilihat bahwa akar dari perbedaan pendapat diantara Ibnu Rusyd dengan mayoritas *fuqaha'* adalah karena Ibnu Rusyd menggunakan *mantuq nas* yang dikuatkan dengan '*illat* kedewasaan (*al-baligh*) dalam *istinbat* hukumnya. Sementara mayoritas *fuqaha'* menggunakan *mafhum mukhalafah* dalam *istinbat* hukumnya yang dikuatkan dengan memakai '*illat* kegadisan (*al-bikr*).

Penelitian yang dilakukan penyusun juga memberikan jawaban bahwa pendapat Ibnu Rusyd tersebut sejalan dengan perundangan yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN

PENGESAHAN PEMBIMBING

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	ix

<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	13

<b>BAB II : BIOGRAFI IBNU RUSYD.....</b>	<b>14</b>
A. Riwayat Hidup .....	14
B. Karya dan Latar Belakang Pemikiran Ibnu Rusyd .....	18
C. Kontribusi Pemikiran Ibnu Rusyd .....	22

<b>BAB III : PERSETUJUAN PERNIKAHAN WANITA DIKALANGAN</b>	
<b>ULAMA .....</b>	<b>27</b>
A. Pernikahan Dalam Hukum Islam .....	27
B. Wanita Dalam Islam .....	35
C. Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan menurut	
Pandangan <i>Fuqaha'</i> .....	39

<b>BAB IV : PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Persetujuan Pernikahan Gadis Menurut Pemikiran	
Ibnu Rusyd .....	46
B. Landasan Pemikiran Ibnu Rusyd Dan Metode	
<i>Instinbath</i> Hukum Yang Dilakukannya .....	51
C. Analisa Penulis Terhadap Pemikiran Ibnu Rusyd	
Tentang Pernikahan Gadis Dengan Hukum Islam .....	58
 <b>BAB V : KESIMPULAN .....</b>	 <b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>69</b>
<b>LAMPIRAN :</b>	
<b>I. DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	<b>xi</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah.

Pernikahan merupakan salahsatu perintah agama Islam kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan, seseorang dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Namun demikian, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki pernikahan belum siap, oleh agama dianjurkan untuk berpuasa.

Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر  
واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : “wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara faraj. Barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa dapat menjadi benteng”. (HR. Bukhari)<sup>1</sup>

Pernikahan juga merupakan salahsatu syariat yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan merupakan syariat Allah untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan keluarga yang penuh rasa kasih dan sayang

---

<sup>1</sup> Bukhari, *al-Jami'u as-Shahih*, (Mesir : al-H.aby, tth), Juz II, h. 4

(*mawaddah wa rahmah*), hidup bersama dalam rumah tangga dan memiliki keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.

Oleh karena itulah, pernikahan yang sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan tercapai.

Hukum Islam telah menentukan syarat-syarat pernikahan, salah satunya adalah adanya persetujuan orang tua dari calon mempelai wanita. Persetujuan ini penting agar memasuki gerbang pernikahan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati membagi tugas dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, tujuan pernikahan dapat tercapai<sup>2</sup>. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, berkata:

حدثنا سفيان ان النبي صم قال: اثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها

Artinya : “ *Sofyan menceritakan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (bikru) itu dimintai persetujuan tentang dirinya oleh bapaknya dan diamnya adalah izinnya*”. (HR.Muslim)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2003), h. 74

<sup>3</sup> Muslim , *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, tth), Juz II, h.593-594

Hadis diatas menjelaskan bahwa, salahsatu persyaratan yang terpenting dalam sebuah pernikahan adalah adanya persetujuan pernikahan dari calon mempelai wanita. Dalam hal persetujuan pernikahan wanita ini, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan status hukumnya.

Karena persetujuan itu sendiri memiliki dua subjek yang memiliki status hukum berbeda di kalangan ulama *fiqh* dalam hal ini yang dimaksud adalah janda atau gadis. Mazhab Syafi'i misalnya menyebutkan bahwa kalau persetujuan dari janda maka status hukumnya adalah wajib. Lain halnya kalau persetujuan datangnya dari gadis dewasa menurut ulama Syafi'iah tidak begitu penting (hanya sekedar sunat), bahkan menurut ulama Syafi'iah ketika sudah memenuhi syarat-syarat tertentu maka orang tua dalam hal ini tidak perlu lagi meminta persetujuan anak gadis tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Antara ayah dan anak tidak ada permusuhan
2. Calon suami sekufu
3. Mahar yang sesuai
4. Calon suami sanggup memberikan mahar
5. Bukan dengan laki-laki yang membuatnya menderita dalam pergaulan<sup>4</sup>

Berbeda dengan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi berpendapat, hukum persetujuan antara janda dengan anak gadis sama saja, keduanya wajib dimintai persetujuan. Lebih lanjut menurut ulama Hanafiah yang membedakan antara janda dengan anak gadis adalah pada tanda persetujuannya, kalau janda harus tegas,

---

<sup>4</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), cet. II h. 467.

sedangkan anak gadis cukup dengan diamnya.<sup>5</sup> Akan tetapi janda dan gadis yang belum dewasa tidak diperlukan persetujuannya.<sup>6</sup>

Di dalam mazhab Maliki, para ulama dalam menyikapi persoalan ini mempunyai perbedaan pendapat. Di satu pihak dengan diwakili oleh Imam Malik menyebutkan bahwa persetujuan anak gadis bukanlah sesuatu yang menentukan artinya bahwa tanpa adanya persetujuan anak gadis pun perkawinan tetap sah, walaupun si anak gadis tidak menginginkan perkawinan itu, dan beliau cenderung mengakui hak *ijbar* orang tua laki-laki.

Sementara di pihak lain Ibnu Rusyd<sup>7</sup> sebagai salah seorang tokoh ulama *fiqh*, ia adalah seorang *mujtahid murajjih* ( *faqihunnafsi* )<sup>8</sup>, dan juga dikenal sebagai ulama yang bermazhab Maliki dan juga sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran hukum Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun bermazhab Maliki namun pendapat-pendapat beliau tentang persoalan *fiqh* yang diketengangkannya justeru banyak berlawanan (bertentangan) dengan mazhabnya.

---

<sup>5</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), cet. I, h. 79

<sup>6</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2002), Juz II, h. 4

<sup>7</sup> Ibnu Rusyd di barat dikenal dengan sebutan Averroes, nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd. Kuniyahnya Abu al-Walid dan laqabnya al-Hafidh. Ia dilahirkan dikota Kordoba pada tahun 520H/1126M. Dia adalah seorang ahli filsafat, matematika, kedokteran, dan fiqh. Lihat, Abu Hasan Asy'ari, *Ibnu Rusyd* (Jakarta : Diah Rakyat, 2009 ), h. 7

<sup>8</sup> *Mujtahid murajjih* ( *faqihunnafsi* ) ialah mujtahid yang menekuni studi banding antara pendapat-pendapat berbeda dikalangan ulama, baik dalam satu madzhab atau dalam berbagai madzhab, menilai mana yang lebih kuat dalilnya, namun mereka tidak pernah melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah baru. Lihat, Dr.Kasui Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, (Kutub Minar, 2005), h. 34



Dan adapun Ibnu Rusyd dalam persoalan ini berpendapat bahwa wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan adalah wanita dewasa dan janda yang sudah dewasa, dan ia tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ia bersikukuh bahwa sigadis dewasa dan janda yang sudah dewasa tersebut tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya.<sup>9</sup>

Dan pendapat beliau itu sependapat dengan Imam Hanafi, al-Auza'i, dan Abu Tsaur, bahwa dalam pernikahan seseorang gadis dewasa harus dimintai persetujuannya dan begitupula dengan janda yang dewasa, akan tetapi berbeda status hukumnya dengan gadis yang masih kecil dan janda yang belum dewasa.<sup>10</sup>

Dalam masalah ini, wanita dibagi dalam 3 jenis. Yaitu gadis muda (*bikru ash-shaghir*), gadis dewasa (*bikru al-baligh*), dan janda (sudah pernah menikah). Dari setiap individu ini, masing-masing mempunyai hukum tersendiri.

#### 1. Gadis muda (*bikru ash-shaghir*)

Yaitu yang belum berusia 15 tahun atau belum mendapat haid. Tidak terdapat perbedaan di kalangan ulama berkaitan tentang permintaan persetujuan dari seorang gadis muda yang akan dinikahkan. Ayahnyalah yang mempunyai hak untuk mengawinkan tanpa meminta persetujuan darinya. Dan gadis muda tidak mempunyai hak untuk mengizinkan perkawinan. Sebab Abu Bakar ash-Shidiq *Radiyallahu'anhu* menikahkan putrinya, Aisyah dengan Rasulullah SAW pada umur 6 tahun dan digauli oleh Rasulullah SAW pada umur 9 tahun. (Riwayat Bukhari dan Muslim)

---

<sup>9</sup> Lihat, Ibnu Rusyd, *op.cit*

<sup>10</sup> *Ibid.*

Imam asy-Syaukani berkata dalam kitab *Nailul Authar* : "Hadits tersebut menunjukkan bahwa dibolehkan bagi seorang ayah untuk menikahkan putrinya sebelum memasuki usia baligh."<sup>11</sup> Dan beliau juga mengatakan, "Hadits tersebut menunjukkan dibolehkannya pernikahan usia muda dengan usia tua. "Mengenai perkawinan gadis muda, Imam Bukhari meletakkan pada bab tersendiri dengan menyebutkan hadits Aisyah dan mengatakan di dalam mukadimah babnya, bahwa hal itu adalah sesuai *ijma*".<sup>12</sup>

Disebutkan di dalam al-Mughni, Ibnul Mundziri berkata, "Setiap ahli ilmu yang kami hafal telah sepakat mengenai hal ini, bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan putrinya yang masih belia, apabila putrinya yang masih belia dikawinkan dengan orang yang sesuai (mampu)."<sup>13</sup>

## 2. Gadis Dewasa (*bikru al-baligh*)

Sedangkan gadis dewasa adalah gadis yang telah baligh (cukup umur), yang sudah berusia 15 tahun atau telah mendapat haid, tidaklah seorang ayah mengawinkan dia, kecuali atas izinnya. Dan izin seorang gadis yang telah baligh adalah diamnya. Maka perkawinan harus dengan persetujuan darinya, walaupun yang mengawinkan adalah ayahnya sendiri.

## 3. Wanita Janda

Sedangkan bagi janda (wanita yang sudah pernah menikah), maka tidaklah ia dikawinkan kecuali atas persetujuannya. Dan persetujuannya itu

---

<sup>11</sup> Asy- Syaukani, *Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, (Libanon: Daar al- Fikr, 1973), Juz VI, h. 128-129

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughni*, (t.t: Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyah,tth), juz VI, h. 487

melalui perkataannya, berbeda dengan seorang gadis (perawan) yang persetujuannya adalah diamnya. Akan tetapi Malik dan Abu Hanifah berpendapat bahwa janda yang belum dewasa dibolehkan untuk memaksanya dalam pernikahannya.<sup>14</sup>

Terjadinya kontradiktif pendapat ulama diatas, hal ini disebabkan adanya pertentangan antara *dalil khitab* dengan keumuman *dalil* tentang masalah diatas. Salah satu *dalil khitab* yang dimaksud adalah pemahaman dari hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صم : تستأمر  
اليتيمة في نفسها

Artinya : “Dari Abu Huraira ra. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda :

*Gadis yatim dimintai persetujuan tentang dirinya. (HR.Abu Daud)*<sup>15</sup>

Menurut hadist di atas bisa dipahami bahwa gadis dewasa yang memiliki orangtua laki-laki (bapak) tidak dimintai pendapat, kecuali yang telah disepakati oleh jumhur ulama tentang permintaan pendapat seorang janda yang sudah dewasa. Dalil inilah yang dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Syafi’i.

Sedangkan keumuman *dalil*, yang dimaksudkan adalah hadist riwayat Imam Muslim dari Sofyan sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*

<sup>15</sup> Abi Daud , *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), Jilid II, h. 231

حدثنا سفيان ان النبي صم قال: الثيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها

Artinya : “ Sofyan menceritakan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (bikru) itu dimintai persetujuan tentang dirinya oleh bapaknya dan diamnya adalah izinnnya. (HR. Muslim)<sup>16</sup>

Hadist diatas merupakan ketentuan umum: yaitu lafadh “*al-bikru*” yang berlaku untuk semua gadis, maka setiap gadis harus dimintai pendapatnya. Ketentuan inilah yang dipegangi oleh Imam Hanafi, al-Auza’i dan Abu Tsaur serta Ibnu Rusyd.

Dapat diketahui juga bahwa dalam menetapkan masalah diatas Ibnu Rusyd selaku *mujtahid* yang menekuni studi banding antara pendapat-pendapat berbeda dikalangan ulama, baik dalam satu *madzhab* atau dalam berbagai *madzhab*, menilai mana yang lebih kuat dalilnya, namun beliau tidak pernah melakukan ijtihad dalam memecahkan masalah baru.

Dalam hal ini, kita harus melihat juga konteks pada masa sekarang seiring dengan perkembangan zaman, yang mana dulunya kaum wanita biasanya ia dirumahnya sehingga mereka cenderung berwawasan sempit dan kurang mengenal dunia luar, maka kondisi sekarang bisa dilihat bahwa kaum wanita adalah

---

<sup>16</sup> Muslim, *Shahih Muslim, op.cit*, h.593-594

golongan yang berwawasan dan tidak sedikit dari mereka yang menjadi pakar dalam disiplin ilmu tertentu.

Berangkat dari kenyataan inilah penulis tertarik untuk mengangkat pemikiran Ibnu Rusyd ini sebagai pembahasan dalam karya ilmiah untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap pemikiran Ibnu Rusyd tentang persoalan diatas, dengan judul : **“Persetujuan Pernikahan Wanita Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd”**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dibatasi pada masalah persetujuan pernikahan gadis, baik ianya gadis dewasa maupun gadis yang belum dewasa terhadap pemikiran Ibnu Rusyd

## **C. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang dan dan pembatasan masalah tersebut, masalah-masalah yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan gadis?
2. Apa landasan pemikiran Ibnu Rusyd tersebut dan bagaimana metode *ijtihad* yang dilakukannya?

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemikiran Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan bagi gadis. Selanjutnya pemikiran ini mempunyai tujuan:

### 1. Tujuan Penelitian.

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan gadis
- b. Untuk mengetahui landasan pemikiran Ibnu Rusyd serta metode *ijtihad* yang digunakannya dalam mengistinbatkan hukum akan masalah tersebut.

### 2. Kegunaan Penelitian

3. Penelitian ini untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam terutama tentang persetujuan pernikahan gadis.
  - a. Penelitian ini dimaksudkan partisipasi penulis dalam mengkaji pemikiran *fiqh* (hukum Islam) klasik untuk kemudian dapat menjadi referensi tambahan bagi pihak yang berkompetensi.
  - b. Penelitian bertujuan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (s1) pada konsentrasi hukum Islam jurusan Ahwal Syakhsiyah fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis<sup>17</sup>, yaitu memaparkan konsep persetujuan anak gadis menurut pandangan kalangan ulama, untuk kemudian menilai sejauhmana pemikiran Ibnu Rusyd akan masalah tersebut.

## 3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengumpulkan, mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini. Adapun sumber primer penelitian ini adalah hasil karya Ibnu Rusyd yaitu karyanya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*,

Sedangkan literatur-literatur yang termasuk kategori sumber skunder adalah kitab-kitab yang membahas tentang *fiqh* munakahat di antaranya adalah kitab *Fiqh 'Ala Mazahibil Arba'ah* karya Abdurahman al-Jaziri, Drs. Slamet Abidin : *Fiqh munakahat*, Ibn Qudamah : *al-Mughni* dan beberapa referensi lainnya yang berkenaan dengan Ibnu Rusyd seperti *Ibnu Rusyd* karya Abuhasan Asy'ari, Dr.Kasui Saiban : *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, Ibnu Rusyd: *ad-Dharuri fi Ushul Fiqh aw Mukhtashar al-Mustashfa* .

Sedangkan literatur lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan ini dapat dijadikan sebagai penunjang dalam penelitian ini baik yang berupa buku, majalah, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya.

---

<sup>17</sup> *Deskriptif analisis* yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah aktual. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), cet. V, h. 139-140

#### 4. Analisis data.

Agar data menghasilkan data yang baik dan kesimpulan baik pula, maka data yang terkumpul akan penulis analisa dengan menggunakan metode analisis sebagai berikut :

##### a. Metode deskriptif

Metode deskriptif digunakan untuk menghimpun data aktual, mengartikan sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskan sebagaimana adanya, tidak diiringi dengan ulasan atau pandangan atau analisis dari penulis.

Metode ini penulis pergunakan untuk memahami pendapat dan istinbath hukum Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan wanita.

##### b. Metode komparasi

Penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur, kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.<sup>18</sup>

Metode ini penulis akan membandingkan pendapat Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan wanita dengan pendapat ulama lain tentang hal yang sama.

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 196.



c. Metode analisis konten

Suatu analisis data atau pengolahan secara ilmiah tentang isi dari sebuah pesan suatu komunikasi. Metode ini penulis pergunakan untuk menganalisis data yang telah disajikan, yang akhirnya terdapat suatu kesimpulan.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

- Bab I Merupakan bab pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, berikut identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II Berisi tentang biografi Ibnu Rusyd yang mencakup tentang riwayat hidupnya, dan karya-karya tulisnya serta kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd.
- Bab III Gambaran umum tentang persetujuan pernikahan wanita dikalangan ulama
- Bab IV Berupa penelitian terhadap penulisan skripsi ini terhadap pemikiran Ibnu Rusyd tentang persetujuan pernikahan wanita, landasan pemikiran beliau akan masalah ini dan metode yang digunakannya untuk mengistinbatkan hukum serta analisa penulis terhadap pemikiran Ibnu Rusyd dengan menghubungkan pemikiran beliau dengan para kalangan ulama lainnya.
- Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### BIOGRAFI IBNU RUSYD

#### A. Riwayat Hidup Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd lahir di Cordova pada tahun 1126 M (520 H), sejak kecil ia diberi nama oleh ayahnya Abu al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusyd.<sup>1</sup> Ia lahir dari keluarga yang ahli dalam bidang *fiqh*. Dengan demikian ayahnya berprofesi sebagai seorang hakim, begitu pula kakeknya, sebagai seorang Hakim Agung pengadilan di Andalusia.<sup>2</sup> Sebagai seorang hakim agung, kakeknya banyak mengeluarkan fatwa-fatwa tertulis yang saat ini masih tersimpan di perpustakaan Paris. Sumber lain menyebutkan bahwa neneknya juga sebagai seorang hakim yang terkenal dengan sebutan Ibnu Rusyd *al-Jadd* (Nenek) adalah kepala hakim pengadilan di Cordova.<sup>3</sup>

Selain belajar al-Quran, al-Hadist, ilmu *fiqh*, bahasa, dan sastra, Ibnu Rusyd juga banyak belajar tentang ilmu matematika dan kedokteran di Cordova.<sup>4</sup> Menurut sumber yang *mutawatir*, ia adalah orang yang sangat tekun dalam mengkaji ilmu dan *mudzakarah*, bahkan ia lakukan setiap malam. Kecuali, ketika kemangkatan ayah dan perkawinannya. Keluasan ilmu itulah yang banyak

---

<sup>1</sup> Abu Hasan Asy'ari, *Ibnu Rusyd*, (Jakarta : Diah Rakyat, 2009 ), h. 2

<sup>2</sup> A. Mustofa, *Filsafat Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 284.

<sup>3</sup> Ahmad Hanafi, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. Ke-6,( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996), h.165

<sup>4</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *Ibnu Rusyd: Sang filsuf, Mistikus, Fakih, dan Dokter*, terj. Kh.ifurrahman Fath, (Jogjakarta: CV Qolam, 2003), h. 30.

mempengaruhi watak berfikir Ibnu Rusyd, yang akhirnya, ia tumbuh dan berkembang sebagai seorang hakim di negeri kelahirannya.

Di balik reputasinya sebagai seorang hakim, Ibnu Rusyd adalah sosok individu yang sangat menjunjung nilai toleransi, rendah hati, dan suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa adanya embel-embel kepentingan. Bahkan sebagai seorang hakim pun, Ibnu Rusyd adalah sosok yang tidak pernah menvonis hukuman mati kepada terdakwa. Itu berarti, bahwa beliau sosok orang yang memiliki sifat pemaaf.

Dengan berbekal ilmu *interdisipliner*, Ibnu Rusyd mampu melampaui orang-orang terdahulunya, yaitu Ibnu Bajjah dan Ibnu Tufail dalam menyederhanakan buah pikiran dari Aristoteles dalam bidang filsafat. Sebagaimana pernyataan Ibnu Rusyd sebagai berikut:

“Bahwa pada suatu hari, Ibnu Tufail memanggilnya dan mengatakan kepadanya bahwa pangeran orang-orang beriman itu mengeluh tentang kesulitan ungkapan dari Aristoteles dan para penterjemahnya, dan menyebutkan kekaburan arah-arahannya, Oleh karena itu, dia meminta Ibnu Rusyd untuk menerima tugas itu.”<sup>5</sup>

Pernyataan tersebutlah, yang menyebabkan luluhnya hati Ibnu Rusyd untuk menerima tawaran dari Abu Ya'qub untuk menulis ulasan-ulasan mengenai

---

<sup>5</sup> A. Mustofa, *op.cit*, h. 285-286

Aristoteles.<sup>6</sup> Dalam menulis ulasan tersebut, ia mengklasifikasikannya menjadi tiga macam ulasan sesuai dengan sasaran pembaca yaitu:<sup>7</sup>

1. Ulasan besar, ulasan ini disebut juga sebagai tafsir sebab ditulis mengikuti pola tafsir al-Quran. Ia mengutip satu paragraf kemudian memberikan penafsiran serta ulasan atasnya.
2. Ulasan menengah, dalam menulis ulasan ini, Ibnu Rusyd terkadang tidak mencatumkan petikan dari teks asli dari tulisan Aristoteles. Metode tersebut lazim dilakukan oleh negeri-negeri muslim di timur. Hal semacam ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Sina dalam kitabnya *al-Shifa*.
3. Ulasan kecil, ulasan ini disebut *talkhis* (artinya: rangkuman) sebab Ibnu Rusyd mengungkapkan pemikiran filsafatnya disamping filsafat Aristoteles.

Dengan prestasi tersebut, legitimasi Ibnu Rusyd semakin diakui oleh masyarakat Eropa pada abad pertengahan. Masyarakat pada saat itu, lebih mengenal Ibnu Rusyd sebagai hakim. Bahkan ia mendapat kedudukan yang sejajar dengan Ibnu Sina sebagai hakim yang agung. Meskipun demikian, proyek intelektual Ibnu Rusyd hanya menguraikan dan menyempurnakan karya-karya Aristoteles.

Bak *sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga*, begitulah kehidupan Ibnu Rusyd yang kurang bersahabat dengan pemerintah. Berbeda

---

<sup>6</sup> Lihat Abu Hasan Asy'ari, *op.cit*, h. 17

<sup>7</sup> A. Mustofa, *op.cit*. h. 286

dengan Ibnu Bajjah yang selalu bersahabat dengan pemerintah. Selain itu, kerasnya pertarungan antara ahli ilmu atau filsafat dengan ahli agama yang memegang otoritas. Menangnya kaum agama, menyebabkan Ibnu Rusyd mendapat bencana, tuduhan demi tuduhan selalu menghantui produk pemikirannya, yang akhirnya ia diasingkan ke Lucena, dekat Cordova.<sup>8</sup>

Tidak puas dengan hukuman Ibnu Rusyd, tipu daya tetap dilakukan oleh kaum agamawan. Tindakan tersebut merambah kepada pembakaran karya-karyanya yang dianggap bertentangan dan membahayakan. Sikap sabar dan ketabahan yang ia lakukan, telah membuktikan akan kebenaran. Sehingga Ibnu Rusyd mendapat pengampunan dari al-Mansur untuk kembali ke Marakush hingga ia mengakhiri kehidupannya pada tahun 1197 M (595H).

TABEL I  
TAHUN TAHUN PERJALANAN IBNU RUSYD

Tahun	Peristiwa	Tokoh	Keterangan
1126	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Lahir</li> <li>– Belajar al-Qur'an</li> <li>– Ilmu perbandingan hukum islam</li> </ul>	Ibnu Rusyd Dari ayahnya Dari Abu Muhammad Ibnu Rizq Dari Ibnu Basykuwal	Di Cordova belajar
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hadist</li> <li>– Belajar ilmu kedokteran dan filsafat</li> </ul>	Abu Ja'far Harun al-Tarjalil dan Abu Marwan Ibnu Jarbun al-Balansi	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Belajar kedokteran</li> </ul>	Ibnu Zuhr (Avenzoar) Ibnu Sina	(tidak langsung dari Ibnu Sina: al-Qanun fi al-Thibb)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ilmu-ilmu filsafat dan teologi</li> </ul>	Ibnu Tufail	

---

<sup>8</sup> A. Mustofa, *op.cit*, h. 287.

1153	– Ke Merakesh, Maroko	Ibnu Tufail	Atas permintaan
1162	Menulis <i>Kitab Al-Kulliyah Fi Al-Thibb</i>		Ensiklopedi kedokteran
1169	Bertemu sultan Abu Ya'qub Yusuf	Ibnu Tufail	Tugas tentang Aristoteles
1169	<i>Kitab Al-Hayawan</i>	Aristoteles	Komentar atas <i>de Anima</i>
1170	<i>Al-Kawn Wa Al-Fasad</i>	Aristoteles	Komentar atas <i>de Generatione et Corruptione</i>
1170	<i>Talkish Al-Sama' Wa Al-Thabi'i</i>	Aristoteles	Komentar atas <i>Physica</i>
1170	<i>Syarh Kitab Al-Burhan</i>	Aristoteles	Komentar atas <i>Demonstration</i>
1174	<i>Talkhis Ma Ba'd Al-Thabi'ah</i>	Aristoteles	Komentar atas <i>Metaphysica</i>
1174	Talkhis kitab <i>al-Syi'r</i>	Aristoteles	Komentar <i>Poetica</i>
1176	Talkhis kitab <i>Al-Akhlak Li Aristhuthalis</i>	Aristoteles	Komentar <i>Ethica Nicomachea</i>
1179	Talkish kitab <i>al-Himmiyat</i>	Galen	Salinan/komentar
1179	Menulis kitab <i>Al-Kasyf 'An Manahij Al-Adilah Fi 'Aqaid Al-Millah</i>		
1180	Menulis <i>Tahafut Al-Tahafut</i>		Balasan terhadap <i>Tahafut al-Falasifah al-Ghazali</i>
1195	Diasingkan	Yusuf Ibnu Ya'qub al-Mansur	Di Lausanne, perkampungan Yahudi 10KM selatan Cordova
1197	Wafat		Di Marakesh

## B. Karya dan Latar Belakang Pemikiran Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd adalah seorang dokter, ahli hukum, dan tokoh filsafat yang paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam (700-1200).<sup>9</sup> Di samping

<sup>9</sup> Lihat , Abu Hasan Asy'ari, *op.cit* , h. 5 - 17

sebagai seorang yang paling *otoritatif* dalam fungsi sebagai komentator atas karya-karya filsafat Yunani Aristoteles, Ibnu Rusyd juga seorang filsafat muslim yang paling menonjol dalam usahanya mencari persesuaian antara filsafat dan syariat. Oleh karena itu, wajar jika ia dikenal sebagai ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan.

Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd tampak pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsafat besar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasannya itu ia tidak semata-mata memberi komentar terhadap filsafat Aristoteles, tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsafat semasa maupun sebelumnya. Kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya menjadi terkenal di Eropa.<sup>10</sup>

Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa sehingga muncul di sana suatu aliran yang dinisbatkan kepada namanya, Avereroisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsafat muslim pendahulunya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan al-Ghazali. Komentar-komentarnya itu banyak diterjemahkan orang ke dalam bahasa Latin dan Ibrani.

Karya-karya monumental Ibnu Rusyd dapat dipahami dari beberapa buku-buku yang dikarang oleh Ibnu Rusyd, meliputi; filsafat, kedokteran, politik, *fiqh*,

---

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 28 - 45

dan masalah-masalah agama.<sup>11</sup> Sebagian karya-karyanya banyak yang hilang dan ada juga yang dibakar dikeranakan beberapa sebab diantaranya. Pertama, tulisan-tulisannya yang asli bahasa arab mengandung anti filsafat dan filosof. Kedua, di Timur ilmu dan filsafat mulai dikorbankan demi berkembangnya gerakan-gerakan mistis dan keagamaan, akibat dari pertarungan antara kaum agamawan dan filosof mengakibatkan Ibnu Rusyd mendapatkan celaan dan siksaan serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya sampai-sampai beliau dianggap sebagai *mulhid*. Latar belakang dari pertarungan itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Makanya para ahli sejarah berbeda pendapat akan jumlah buku-buku hasil karyanya. Namun yang bisa diambil sebagai spirit perumusan dan pengembangan *fiqh* emansipatoris, adalah tiga bukunya *Fashl al-Maqal*, *al-Kashf'an Manahij al-Adillah* dan *Tahafut al-Tahafut*, yang ditulis berturut-turut pada tahun 1178, 1179, dan 1180. Karya ini memuat pandangan kontroversial Ibnu Rusyd yang pernah menggemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13. Selain itu, karya *Kitab Fash al-Maqal fi Mi Bain al-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittishal*, terjemahan dalam bahasa Indonesia terbitan Pustaka Firdaus, Jakarta, dengan judul *Kaitan Filsafat dengan Syariat*, yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan. Begitu juga dengan karya *Al-Kasyf 'an Manahij al-Adillah fi 'Aqaid al-Millah* (Menyingkap pelbagai metode argumentasi ideologi Agama-agama) yang menjelaskan secara terinci masalah-masalah akidah yang dibahas oleh para filsafat dan teolog Islam. Selanjutnya adalah karya *Tahafut al-Tahafut* (Kerancuan dalam Kitab Kerancuan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 7



karya al-Ghazali) yang kandungan isinya membela kaum filsafat dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan al-Ghazali dalam bukunya *Tahafut al-Falasifah* (Kerancuan Filsafat).

Karya lainnya yang juga penting dalam bidang *fiqh*, adalah *Bidayah al-Mujtahid* (permulaan bagi Mujtahid). Karya ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibnu Rusyd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam mazhab. Diantara karya besar yang pernah dihasilkan Ibnu Rusyd ialah *Kulliyah fit Thibb* yang mengandung 16 jilid ilmu perobatan secara umum, *Mabadil Falsafah* (Pengantar Ilmu Falsafah), *Tafsir Urjuza* yang membicarakan perobatan dan tauhid, *Tashul* (Mengenai ilmu kalam), *Kasyful Adillah* yang mengungkap persoalan falsafah dan agama, dan *Muwafaqatil Hikmah Wal Syari'a* yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama.

Ibnu Rusyd juga telah menulis sebuah karya mengenai musik yang diberi judul *De Anima Aristoteles*. Sebelum meninggal dunia, ia telah menghasilkan bukunya yang terkenal *al-Taysir*. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris, dengan judul *Facilitation of Treatment*. Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Ia tidak meninggalkan sebarang harta benda melainkan ilmu dan tulisan dalam pelbagai bidang seperti falsafah, perobatan, ilmu kalam, falak, *fiqh*, musik, ilmu perbintangan, tata bahasa, dan *nahu*. Karya tulisan Ibnu Rusyd membuktikan penguasaan dalam berbagai bidang dan cabang ilmu sehingga usaha untuk menterjemahkan tulisannya dilakukan ke dalam bahasa lain. Karya *Kulliyah fit-*

*Thibb* diterjemahkan kedalam bahasa Latin pada 1255 oleh Bonacosa. Dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dengan judul *General Rules of Medicine*. Hasil pemikiran yang dimuatkan dalam tulisannya, terutama dalam bidang falsafah, mempengaruhi ahli falsafah Barat.

### C. Kontribusi Pemikiran Ibnu Rusyd

Bermodal ilmu *interdisipliner* yang dipelajarinya, Ibnu Rusyd adalah sosok yang memiliki kemampuan lebih dalam mengulas pemikiran-pemikiran Aristoteles. Hal tersebut dilakukan karena Ibnu Rusyd selalu menggunakan landasan berfikir yang ingin mempersatukan antara ilmu agama dengan filsafat.<sup>12</sup> Dalam mempersatukan keduanya, Ibnu Rusyd selalu melihat bagaimana hubungan antara akal dengan wahyu. Hal tersebut didasarkan atas penghargaan beliau kepada al-Quran dan al-Hadist Nabi bahwa syariat bukan saja mengizinkan, bahkan mewajibkan kita untuk selalu merenungkan segala sesuatu dengan akal. Walau akhirnya, ia menyakini akan kelemahan fungsi akal yang masih ada hal-hal yang tidak diketahui.<sup>13</sup>

Pemikiran Ibnu Rusyd sangat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Yunani. Pemikiran yang berkembang di Yunani pada saat itu adalah pemikiran berfilsafat, sehingga tidak heran, jika sebagian besar produk pemikiran Ibnu Rusyd bergumul dalam bidang filsafat. Sebagian yang lain, Ibnu Rusyd menulis dalam bidang

---

<sup>12</sup> Hidayat, A, *Pemikiran Islam tentang Teologi dan Filsafat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006), h. 13.

<sup>13</sup> *Ibid.* h. 14.

politik, kedokteran, dan *fiqh*. Tetapi, satu hal yang perlu diingat bahwa ia tidak pernah mempelajari secara langsung teks-teks asli Yunani.

Dalam bidang filsafat, terdapat empat pokok pikiran Ibnu Rusyd yang sangat terkenal hingga dewasa ini. Dari pokok pikiran tersebut, terdeskripsikan bahwa Filsafat Ibnu Rusyd sebagaimana yang difahami oleh orang Eropa pada abad pertengahan dan Filsafat Ibnu Rusyd tentang akidah dan sikap keberagamaannya.<sup>14</sup> Mengenai pemikiran filsafat, misalnya, Ibnu Rusyd meneliti *firqah-firqah* besar dalam Islam, diantaranya, *Ash'ariyah*, *Mu'tazilah*, *Batiniah* (Tasawuf), dan *Hashiwiyyah*. Menurut Ibnu Rusyd, bahwa mengenal pencipta itu hanya mungkin dengan mempelajari ciptaannya (alam wujud), untuk dijadikan petunjuk bagi adanya pencipta. Pendapat ini didasari oleh Ibnu Rusyd dengan dua dalil yaitu *dalil Inayah*.<sup>15</sup>

Selain filsafat, pemikiran Ibnu Rusyd tertuju dalam bidang politik. Dalam bidang ini, Ibnu Rusyd melihat kepada pemikiran-pemikiran Aristoteles dan Plato tentang konsep politiknya. Menurut Ibnu Rusyd bahwa aksi politik yang efektif, terutama untuk meningkatkan kebaikan melalui legislasi, mensyaratkan adanya pengetahuan teoritis dan praktis. Akan tetapi amat disayangkan, bahwa karya penting ini tidak sampai ketangan pembaca dewasa ini. Mungkin itulah salah satu karyanya yang juga ikut dibakar pada penguasa pada masanya.

Tidak kalah pentingnya, pemikiran Ibnu Rusyd dalam bidang *Fiqh*. Dalam karya besarnya ini, ia berhasil mendudukan seluruh pendapat para Imam Mazhab

---

<sup>14</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *op.cit*, h. 58.

<sup>15</sup> Yaitu dalil yang mendorong untuk melakukan penyelidikan dan menyingkap rahasia-rahasia alam.

besar dengan menyebutkan alasannya masing-masing dan dilengkapi dengan hasil ijtihadnya sendiri. Diantaranya ijtihad Ibnu Rusyd mengenai masalah Ibadah.

Proyek besar pemikiran Ibnu Rusyd yang monumental sangat berpengaruh bagi perkembangan pemikiran Islam dewasa ini. Diterimanya pemikiran Ibnu Rusyd oleh masyarakat Eropa, berdampak pada terciptanya sebuah peradaban yang maju, ditambah lagi dengan mudahnya masyarakat eropa dalam menelaah produk pemikiran Ibnu Rusyd karena sebagian besar karyanya diterjemahkan dalam bahasa Latin dan Yahudi.

Walaupun demikian, pemikiran Ibnu Rusyd tidak terlalu berpengaruh di Asia, terutama Asia Tenggara. Untuk menelusuri lebih lanjut, terlebih dahulu kaum muslim di daerah ini hendaknya menyadari, bahwa berkembangnya ajaran Al-Ghazali yang terkesan menentang bahkan mendeskreditkan pergumulan dari sebuah pemikiran. Sehingga, kekritisian Ibnu Rusyd telah banyak diwarisi oleh masyarakat Barat.

Di Indonesia, Harun Nasutionlah yang berhasil membuka jalan akan dilegalkannya produk-produk pemikiran para Filosof seperti Ibnu Rusyd. Sehingga, warisan Ibnu Rusyd mulai tampak terlihat dari para cendikia muslim Indonesia dewasa ini. Kehidupan Ibnu Rusyd sebagai pemikir besar dalam dunia Islam, ia menghabiskan waktunya dengan mempelajari ilmu agama (al-Qur'an, al-Hadist, *fiqh*), bahasa, sastra, kedokteran, dan politik. Dengan bekal itulah ia memiliki kemampuan yang melebihi ulama-ulama sebelumnya dalam menelaah karya-karya kuno seperti karya-karya Aristoteles. Walau akhirnya ia harus menerima bencana yang menimpanya.

Kontribusi pemikiran Ibnu Rusyd, terangkum dalam kerangka besar produk pemikiran, baik bidang filsafat, politik, *fiqh* serta kedokteran yang sangat berpengaruh bagi perkembangan Islam dalam mengusung peradaban. Tetapi amat disayangkan, sebagian besar karyanya habis dibakar oleh rezim politik yang anti pemikiran.

Dari sekian pemikiran Ibnu Rusyd yang paling berpengaruh, baik di Barat maupun di Timur ialah teori tentang harmoni (perpaduan) agama dan filsafat. Ibnu Rusyd memberikan kesimpulan bahwa filsafat adalah saudara sekandung dan sesusuan agama. Dengan kata lain, tak ada pertentangan antara wahyu dan akal, filsafat dan agama, para nabi dan Aristoteles, karena mereka semua datang dari asal yang sama. Ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan karakter filsafat sebagai ilmu yang dapat mengantarkan manusia kepada pengetahuan yang lebih sempurna.

Menurutnya, belajar filsafat dan berfilsafat itu sendiri tidak dilarang dalam agama Islam, bahkan al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam berisi banyak ayat yang menghimbau agar mempelajari filsafat. Untuk menghindari adanya pertentangan antara pendapat akal serta filsafat dan teks al-Qur'an, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa teks al-Qur'an itu hendaknya diberi interpretasi sedemikian rupa atau dilakukan *takwil*. *Takwil* inilah yang merupakan salah satu bahasan penting dalam memahami agama. Dan begitu juga dengan tingkatan manusia dalam menerima pembuktian kebenaran sesuai dengan watak dasar dan kapasitasnya masing-masing.

Khususnya mengenai hubungan antara agama dan filsafat, Ibnu Rusyd menawarkan satu pandangan baru yang sama sekali orisinil dan rasional. Dalam arti mampu menangkap dimensi rasionalitas baik dalam agama maupun dalam filsafat. Rasionalitas filsafat dibangun atas landasan keteraturan alam ini, dan juga pada landasan prinsip kausalitas.<sup>16</sup> Sementara itu, rasionalitas agama juga dibangun atas dasar maksud dan tujuan yang diberikan Tuhan (*maqashid al-syari*), dan yang pada akhirnya bermuara pada upaya membawa manusia kepada nilai-nilai kebajikan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Muhammad Abid al-Jabiri, bahwa gagasan *maqashid al-syar'i* dalam disiplin ilmu-ilmu agama sebanding dengan gagasan hukum-hukum kausalitas di alam ini. Prinsip semacam inilah yang kemudian dirujuk oleh al-Syathibi dalam rasionalisme agama, dan Ibnu Khaldun dalam rasionalisme sejarah.

---

<sup>16</sup> Abbas Mahmud al-Aqqad, *op.cit*, h. 53.

### BAB III

## PERSETUJUAN PERNIKAHAN WANITA DIKALANGAN ULAMA

#### A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

##### I. Defenisi Pernikahan

Pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya<sup>1</sup>

Menurut bahasa, nikah adalah menggabungkan, setiap gabungan antara dua hal disebut dengan nikah. Sedangkan defenisi nikah menurut istilah adalah akad perkawinan yang sah. Nikah juga terkadang digunakan untuk mengungkapkan arti hubungan suami istri. Jika kata nikah disandarkan kepada istri dengan mengatakan “ : ia menikahi si fulan”, maka yang dimaksud adalah melakukan akad pernikahan (umum).

Adapaun tentang makna pernikahan secara defenitif, masing-masing ulama *fiqh* berbeda dalam mengemukakannya pendapatnya antara lain sebagai berikut :

- a. Ulama Hanafiyah mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki

---

<sup>1</sup> Drs. Slamet Abidin, *Fiqh Mumakahat*, (Bandung : Pustaka Setia , 1999) h. 9

dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.

- b. Ulama Syafi'iyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zawaj*, yang menyimpan arti memiliki wali. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.
- d. Ulama Hanabilah, menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafal *inkah* atau untuk mendapatkan kepuasan, artinya seseorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikan seperti wakil atau wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2010), cet. 25, h 309



## II. Hukum-hukum dalam Pernikahan

Di dalam pernikahan berlaku lima hukum

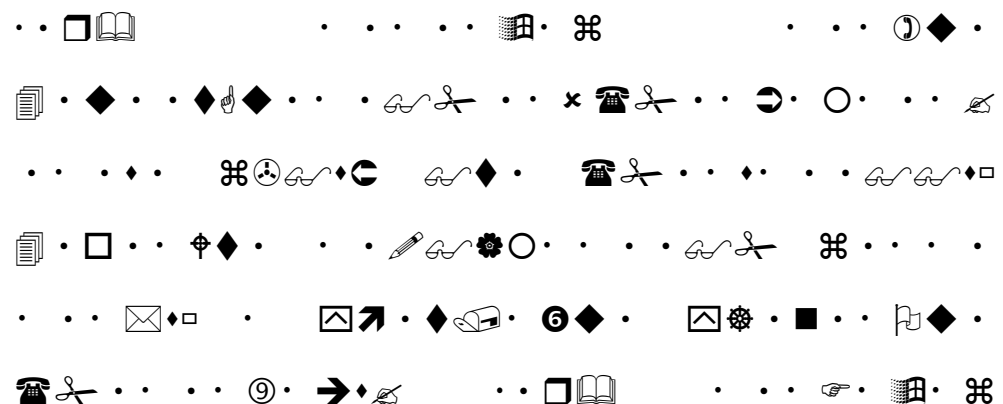
### a. Wajib

Hukum ini berlaku bagi orang yang takut berbuat zina jika dia tidak melakukannya, sedangkan dia adalah orang yang mampu melakukannya. Meninggalkan zina adalah wajib, sedangkan apa yang dapat menyempurnakan kewajiban adalah juga wajib.

### b. Haram

Hukum ini berlaku pada pernikahan di Negara yang sedang terjadi peperangan. Karena pernikahan tersebut terkadang dapat menyebabkan kelahiran beberapa anak, kemudian anak tersebut dapat di bunuh dan di culik.

Contoh pernikahan jenis ini adalah seseorang yang mempunyai istri bermaksud menikah dengan wanita lain, akan tetapi dia khawatir tidak dapat berlaku adil. Dalam kondisi seperti ini dia haram menikah. Allah SWT berfirman :



c. Makruh

d. Mubah

e. Sunnah

يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر  
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya : wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang (sudah mampu) untuk menikah, maka menikahlah. Katena ia dapat lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka puasalah maka ia dapat menjadi tameng buatmu”. (HR. Bukhari Muslim)

### III. Syarat dan rukun pernikahan

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan, apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka sahlah pernikahan dan menimbulkan kewajiban dan hak sebagai suami istri. pada garis besarnya, syarat sah pernikahan ini adalah :

1. Laki-laki dan perempuannya sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin adalah yang bukan haram dinikahi, baik haram karena untuk sementara atau selamanya.
2. Akad nikahnya dihadari oleh para saksi

#### Rukun pernikahan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun pernikahan adalah terdiri atas :

1. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan.

Sudah menjadi sunattullah bahwa semua mahluk dijadikan oleh Allah SWT di muka bumi dengan berpasang-pasangan termasuk manusia.

2. Adanya wali dari pernikahan pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wakilnya yang akan menikahkannya.

3. Adanya dua orang saksi

4. *Sighat* akad nikah yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin lelaki

Wali berkata : Saya nikahkan, dan saya kawinkan anak perempuan saya bernama fulanah, untuk saudara dengan mas kawin Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah ) kontan.

Pengantin pria menjawab : Saya terima nikah dan kawinnya fulanah dengan mas kawin yang telah disebutkan.

#### IV. Tujuan Pernikahan

1. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang alami.

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan akad nikah (melalui jenjang pernikahan). Bukan dengan cara yang amat kotor menjijikkan seperti cara-cara orang sekarang seperti: berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang jauh dan diharamkan oleh Islam.

2. Untuk membentengi akhlak yang luhur.

Sasaran utama dari disyariatkannya pernikahan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang pernikahan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan serta melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah SAW bersabda : “Wahai

para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih Menundukan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (*shaum*), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.

(Hadits Shahih Riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa’i, Darimi, Ibnu Jarud dan Baihaqi).

### 3. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami.

Dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa Islam membenarkan adanya Thalaq (perceraian). Jika suami istri sudah tidak sanggup lagi menegakkan batas-batas Allah, sebagaimana firman Allah: “Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zhalim”. (Al-Baqarah : 229).<sup>3</sup>

### 4. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.

Menurut konsep Islam, hidup sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dari sudut pandang ini, rumah tangga adalah salah satu lahan subur bagi peribadatan dan amal shalih di samping ibadah dan amal-amal shalih yang lain. Sampai-sampai bersetubuh (berhubungan suami-istri) pun termasuk ibadah (sedekah). Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Jika kalian bersetubuh dengan istri-istri kalian termasuk sedekah!.” Mendengar sabda Rasulullah itu para

---

<sup>3</sup> Al-Baqarah (2) : 229

shahabat keheranan dan bertanya: “Wahai Rasulullah, seorang suami yang memuaskan nafsu birahinya terhadap istrinya akan mendapat pahala ?” Nabi shallallahu alaihi wa sallam menjawab: “Bagaimana menurut kalian jika mereka (para suami) bersetubuh dengan selain istrinya, bukankah mereka berdosa .? “Jawab para shahabat : “Ya, benar”. Beliau bersabda lagi : “Begitu pula kalau mereka bersetubuh dengan istrinya (di tempat yang halal), mereka akan memperoleh pahala!”. (Hadits Shahih Riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa’i dengan sanad yang Shahih).

5. Untuk mencari keturunan yang shalih dan shalihah.

Tujuan pernikahan diantaranya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam. Allah berfirman: “Allah telah menjadikan dari diri-diri kamu itu pasangan suami istri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”. (An-Nahl : 72).<sup>4</sup>

Yang tak kalah pentingnya, dalam pernikahan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas yaitu mencetak anak yang shalih dan shalihah serta bertaqwa kepada Allah SWT. Keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan tarbiyah Islam (pendidikan Islam) yang benar. Disebutkan demikian karena banyak “Lembaga Pendidikan Islam”, tetapi isi dan metodenya tidak

---

<sup>4</sup> An-Nahl : 72

Islami. Sehingga banyak terlihat anak-anak kaum muslimin tidak memiliki akhlaq Islami sebagai akibat pendidikan yang salah. Oleh karena itu suami istri bertanggung jawab mendidik, mengajar, dan mengarahkan anak-anaknya ke jalan yang benar.

Islam memandang bahwa pembentukan keluarga merupakan salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang lebih besar yang meliputi berbagai aspek kemasyarakatan berdasarkan Islam yang akan mempunyai pengaruh besar dan mendasar terhadap kaum muslimin dan eksistensi umat Islam.

## **B. Wanita Sebelum dan Sesudah Islam Datang**

Sebelum membahas dan memahami persoalan wanita lebih jauh, kita mesti mengetahui terlebih dahulu arti kosakata *untsa* (wanita atau perempuan) dalam beberapa kamus bahasa Arab berarti lemah gemulai. Kalangan *Fuqaha* pernah menyebutkan. Kaum wanita memiliki ciri-ciri khusus yaitu struktur fisik yang membedakannya dengan laki-laki, ciri-ciri itu adakalanya kasatmata seperti menstruasi, dan adakalanya abstrak seperti perangai yang telah terpatrit dalam diri setiap wanita yaitu lemah gemulai.

Dalam al-Qur'an kata *untsa* disebut dalam beberapa konteks berbeda. Di satu sisi berkenaan dengan persamaan hak perempuan dan laki-laki dalam beramal serta

mendapat pahala dari Allah, di sisi lain mengulas perbedaan spesifik keduanya dari sisi kehamilan yang dialami perempuan dan kisah-kisah perempuan yang mengisyaratkan perbedaan diri mereka dengan kaum laki-laki<sup>5</sup>.

Sebagaimana laki-laki, perempuan juga memiliki beberapa kewajiban agama yang sama. Akan tetapi, Islam membuat beberapa ketentuan hukum bagi perempuan yang tentu saja dengan sesuai kapasitas fisik dan wujud biologisnya. Hal ini tak lain adalah suatu penghormatan dan penghargaan besar terhadap diri perempuan.

Beberapa ketentuan hukum bagi perempuan setelah Islam datang:

1. Sebagai manusia perempuan mempunyai hak untuk di jaga, di rawat dan di pelihara sejak masih kecil. Ia juga berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Sebagai wanita perempuan di tuntut untuk menjaga kewanitaannya. Ia dianjurkan untuk berhias diri dan diharamkan bertingkah menyerupai laki-laki. Ia juga diperintahkan untuk menutup seluruh bagian tubuhnya dan tidak bergaul atau bercampur dengan laki-laki asing dan karenanya perempuan berdiri di belakang *shaf* laki-laki ketika shalat berjamaah
3. Sebagai muslimah perempuan mesti mengerjakan seluruh perintah agama yang diwajibkan Allah tentu saja dengan perbedaan sifat pada beberapa jenis ibadah yang diwajibkan kepada laki-laki.

---

<sup>5</sup> Abd al-Qadir Mansur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, terj. Muhammad Zainal Arifin ( Jakarta : Zaman, 2009), h. 23



Perlu kita ketahui, ketika ajaran *Ilahiah* (sebelum Islam) mulai sirna dari panggung kehidupan masyarakat sepanjang sejarah, setiap masyarakat atau bangsa akhirnya menetapkan hukum-hukum terkait hak perempuan berdasarkan egoisme mereka. Perempuan ditempatkan tak lebih sebagai sampah, pemuas nafsu seksual, bahkan adapula yang memuja serta menuhankan mereka. Hukum-hukum tersebut sungguh jauh dari nilai keseimbangan. Bahkan, bisa dikatakan ekstrem dan radikal.

Untuk mengetahui dan memahami lebih jauh hukum-hukum tersebut, kita perlu menelusuri jejak-jejak sejarah terkait praktik kehidupan yang acap kali mencederai hak perempuan. Sekalipun tidak bisa menengahkannya secara terperinci, penulis cukup mengulasnya sekilas.

Bagi bangsa Yunani, perempuan adalah kotoran dan setengah dari wujud perempuan diharamkan dari seluruh hak-hak sipil, seperti jual beli, organisasi, dan lainnya. Perempuan juga tidak punya hak waris, apapun hubungan darahnya, karena hak waris dianggap hanya milik laki-laki. Hukum-hukum tersebut terus berlaku sampai kemudian kaum cerdik-cendekia bangkit dan berjuang mengembalikan sebagian hak perempuan yang dirampas itu.

Bagi bangsa Romawi, perempuan dianggap seperti tawanan yang bisa diperlakukan seenaknya. Seorang perempuan mesti tunduk dan patuh kepada suaminya selama sang suami masih hidup. Suami memiliki diri istri secara penuh. Tak ada jaminan perlindungan sedikitpun atas perempuan. Perempuan diperlakukan layaknya barang kepemilikan yang bisa dijual maupun dianiaya kapan saja oleh suaminya.

Kaum Yahudi memandang perempuan sebagai laknat yang wajib di jauhi dan tidak bisa dipercaya untuk menjaga rahasia atau tugas tertentu. Hal ini dikarenakan kitab Taurat memperingatkan mereka agar berhati-hati dan selalu mewaspadaikan kaum perempuan.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan dengan kaum Nasrani juga memberikan kaum yang cenderung menghinakan, melecehkan dan membenci kaum perempuan. Isyarat pelecehan dan penghinaan pada kaum perempuan ini tergambar jelas dalam beberapa teks kitab suci mereka.<sup>7</sup>

Kedudukan perempuan dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam juga tidak lebih baik daripada pandangan bangsa-bangsa lain. Dalam semua lini kehidupan, perempuan mengalami diskriminasi dan penindasan. Kedudukan perempuan pada tradisi Arab bisa diringkas dalam beberapa poin berikut :

1. Perempuan dilarang mendapatkan hak waris, karena hak waris hanya untuk laki-laki.
2. Tidak ada batasan jumlah istri dalam pernikahan. seorang laki-laki boleh menikah lebih dari satu istri tanpa terbatas.
3. Tidak ada batasan jatuh talak seorang laki-laki bebas menjatuhkan talak kepada istrinya, kapanpun suaminya mau. Demikian juga ketika suami ingin

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 14

<sup>7</sup> *Ibid*

rujuk, tak da batasan waktu tertentu. Adapun pihak perempuan sama sekali tidak berhak berbicara dalam soal ini

4. Istri termasuk harta peninggalan suami. Ketika suami meninggal, sang istri menjadi warisan bagi anak-anaknya dimana sang pewaris bebas menikahi atau menikahkannya dengan siapapun.
5. Mengubur hidup-hidup anak perempuan, dengan alasan anak perempuan merupakan aib keluarga dan penyebab kemelaratan.
6. Dan sebagainya.

Ketika ajaran Islam muncul, semua belenggu yang menistakan perempuan itu dihancurkan. Kehormatan dan nilai-nilai kemanusiaan perempuanpun dikembalikan perempuan ditempatkan sebagai makhluk yang merdeka dan mulia.

### **C. Persetujuan Wanita Dalam Pernikahan menurut Pandangan *Fuqaha'***

Berikut diuraikan lebih lanjut pendapat empat mazhab tentang pembahasan persetujuan wanita dalam pernikahan, yaitu :

#### **a. Mazhab Maliki**

Dalam kaitan persetujuan dan kebebasan wanita dalam memilih pasangan (calon suami), imam Malik membedakan antara janda dengan gadis. Untuk janda harus ada persetujuan dengan tegas sebelum akad nikah. Adapun gadis dan janda yang belum dewasa yang belum digauli oleh suaminya ada perbedaan antara bapak sebagai wali dengan wali di luar bapak. Bapak sebagai wali menurut beliau

berhak memaksa anak gadisnya dan janda yang belum dewasa (hak *ijbar*) untuk menikah, sedangkan wali selain bapak tidak mempunyai hak *ijbar*. Dengan kata lain, seorang bapak boleh menikahkan anak gadis dan janda yang belum dewasa walaupun tanpa persetujuan keduanya.<sup>8</sup> Otoritas yang dimiliki bapak itu lanjut imam Malik karena memang *syara'* mengkhususkan demikian, atau karena kasih sayang seperti yang dimiliki seorang bapak tidak akan dimiliki oleh wali yang lain.<sup>9</sup>

Kemudian az-Zarqani menuliskan dua pandangan '*Iyad* tentang pembahasan ini, pertama bahwa wanita yang masih gadis, walinyalah yang lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya, kedua, sedangkan wanita janda lebih berhak dalam menentukan persetujuan dalam perkawinannya.<sup>10</sup> Kedua pendapat ini didasarkan pada hadis Nabi

الايم احق بنفسها من وليها

Pendapat pertama, dengan mengambil *mafhum mukhalafah* dari hadis ini, sedangkan pendapat kedua dengan menghubungkan hadis ini dengan hadis Nabi:<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), h. 70

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 5

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 71

<sup>11</sup> Abi 'Isa Muhammad bin Sawrah, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1408/1988), juz III, h. 407, hadis nomor 1101, "Kitab an-Nikah", "Bab *Ma Ja'a illa bi Waliyyi*", Sanad hadis ini *marfu'* *muttasil*, hadis dari 'Ali bin Hujr diceritakan Syarik bin 'Abdullah dari Abi Ishaq

## لا نكاح الا بولي

Dalam perkembangan selanjutnya, ketika membahas tentang persetujuan janda dalam perkawinannya, ulama *mutaakhirin* dalam mazhab Malik terpecah kepada tiga kelompok, *pertama*, bapak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya apabila perceraian terjadi sebelum ia dewasa, ini adalah pendapat Asyhab. *Kedua*, bapak tetap boleh menikahkannya walaupun perceraian terjadi setelah ia dewasa, ini pendapat Sahnun. dan *ketiga*, bapak tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya baik perceraian terjadi sebelum atau sesudah ia dewasa, ini pendapat AbuTammam.<sup>12</sup>

### b. Mazhab Hanafi

Menurut Abu Hanifah, persetujuan wanita (calon istri) gadis atau janda harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, kalau mereka tidak setuju, maka akad nikah tidak boleh dilanjutkan. Walaupun yang menjadi wali adalah bapak kandung mereka sendiri.<sup>13</sup>

Adapun dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan, menurut Abu Hanifah adalah kasus di masa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak perkawinan seorang gadis yang dinikahkan bapaknya, karena gadis tersebut tidak menyetujui, yakni kasus yang terjadi pada al-Khansa'. dalam kasus ini, al-Khansa' menemui dan melaporkan kasus yang menimpa dirinya,

---

<sup>12</sup> Ibn Rusyd, *op.cit*, h. 5

<sup>13</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi...*, *op.cit*, h. 75

yakni dia dinikahkan bapaknya kepada saudara bapaknya yang tidak ia senangi, pada saat itu Nabi balik bertanya “apakah kamu diminta izin (persetujuan)?” al-Khansa’ menjawab “ saya tidak senang dengan pilihan bapak”. Nabi lalu menetapkan perkawinannya sebagai perkawinan yang tidak sah, seraya bersabda/berpesan “nikahlah dengan orang yang kamu senangi”.<sup>14</sup> al-Khansa’ berkomentar, “bisa saja aku menerima pilihan bapak, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa bapak tidak berhak untuk memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak wanitanya dan nabi menyetujuinya. Ditambah lagi oleh al-Khansa’, “nabi tidak minta keterangan apakah saya gadis atau janda”, seperti dicatat sebelumnya.<sup>15</sup>

Kasus al-Khansa’ ini menjadi salah satu dalil tidak adanya perbedaan antara janda dengan gadis tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada tanda persetujuan itu sendiri; kalau gadis cukup dengan diamnya saja, sementara janda harus tegas.<sup>16</sup>

Terbukti bahwa menurut beliau seorang wanita yang sudah baligh dan berakal sehat boleh menikahkan dirinya baik ia masih perawan atau sudah janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat, calon suami yang dipilihnya itu sekufu dengannya dan

---

<sup>14</sup> عن خنساء بنت خدام زوجها ابوها وهي كارهة وكانت ثيبا فانت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردنكاحها

<sup>15</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi....*, op.cit, h. 77

<sup>16</sup> *Ibid.*

maharnya tidak kurang dari mahar *misil*. Akan tetapi kedua syarat ini mempunyai konsekwensi hukum apabila tidak terpenuhi yaitu wali boleh menentang perkawinan itu bahkan wali bisa meminta *qadi* untuk membatalkan perkawinan itu.<sup>17</sup>

c. Mazhab asy-Syafi'i

Imam Syafi'i membuat klasifikasi terkait dengan kebebasan wanita dan persetujuannya kepada tiga kelompok, yakni: pertama, gadis yang belum dewasa, kedua, gadis dewasa, dan ketiga, janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya adalah belum lima belas tahun (15) atau belum haid, maka seorang bapak dalam hal ini menurut beliau boleh menikahkan si gadis walaupun tanpa seizinnya, dengan syarat perkawinan itu menguntungkan bagi si anak gadis. Pandangan beliau ini didasarkan pada tindakan Abu Bakar yang menikahkan 'Aisyah kepada Nabi, dan umur 'Aisyah ketika itu baru sekitar tujuh tahun.

Adapun perkawinan gadis dewasa, ada hak berimbang antara bapak (wali) dengan anak gadisnya. Hak bapak didasarkan pada *mafhum mukhalafah* hadis yang menyatakan "janda lebih berhak terhadap dirinya". Menurut imam asy-Syafi'i *mafhum mukhalafah* hadis ini bapak lebih berhak menentukan urusan

---

<sup>17</sup> Muhammad Jawad al-Mugniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk.cet V (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000), h. 345

perkawinan anak gadisnya<sup>18</sup>, meskipun dianjurkan musyawarah antara bapak dengan si anak gadis, berdasarkan firman Allah:<sup>19</sup>

### وشاورهم في الامر

Dari penjelasan asy-Syafi'i, akhirnya bisa dilihat bahwa dalam kasus gadis dewasa pun hak bapak sebagai wali masih melebihi hak gadis. Kesimpulan ini didukung oleh ungkapan asy-Syafi'i sendiri yang menyatakan bahwa persetujuan gadis bukanlah suatu keharusan (فرض) tetapi hanya sekedar pilihan (اختيار).<sup>20</sup>

Adapun perkawinan seorang janda menurut beliau harus ada persetujuan yang jelas dari yang bersangkutan. Kebutuhan ini didasarkan pada kasus perkawinan yang ditolak Nabi karena ia nikahkan oleh walinya dengan seorang laki-laki yang tidak disenangi ditambah lagi tanpa diminta persetujuannya terlebih dahulu.<sup>21</sup> Dengan demikian, hadis ini menurut beliau menyatakan seorang janda lebih berhak terhadap dirinya dari walinya. Ketetapan ini diperkuat hadis lain.<sup>22</sup> Dengan menyebut lebih berhak pada dirinya (احق بنفسها) berarti untuk

---

<sup>18</sup> Ini didukung pernyataan ulama *Syafi'iyah* bahwa apabila bapak sebagai wali tidak perlu lagi meminta izin kepada anak gadisnya apabila telah memenuhi ketujuh syarat berikut: pertama, antara bapak dengan anak tidak ada permusuhan. Kedua, antara si anak gadis dengan calon suaminya tidak ada permusuhan. Ketiga, calon suaminya sekufu'. Keempat, calon suami sanggup memberikan mahar. Kelima, mahar yang sesuai. Keenam, mahar merupakan mata uang setempat, ketujuh mahar dibayar kontan, lihat 'Abdul ar-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Afkar, t.t.), juz IV. h. 35

<sup>19</sup> 'Ali Imran (3) : 159

<sup>20</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi...., op.cit* , h. 84

<sup>21</sup> عن خنساء بنت خدام زوجها ابوها وهي كارهة وكانت ثيباً فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فردنكاحها

<sup>22</sup> الايم احق بنفسها من وليها



sempurnanya perkawinan harus dengan persetujuannya dan tidak ada orang lain yang berhak untuk mencegahnya untuk nikah.<sup>23</sup>

d. Mazhab Hanbali

Dalam *al-Mugni*, Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari mazhab ini mengklaim, ulama sepakat adanya hak *ijbar* wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita itu senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Ibnu Qudamah sendiri cenderung berpendapat, bapak berhak memaksa anak gadisnya baik dewasa atau belum, menikah dengan pria sekufu walaupun wanita tersebut tidak setuju.<sup>24</sup> Menurut beliau, dasar bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa adalah firman Allah:<sup>25</sup>

وَاللَّائِي يَئْسَنُ مِنَ الْمَحْيِضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ  
وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنَّ

Pada prinsipnya ayat ini berbicara tentang masa ‘*iddah* seorang wanita yang belum haid atau wanita yang sudah putus haid. Logika sederhana adalah ‘*iddah*

---

<sup>23</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi....*, *op.cit*, h. 85

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 88

<sup>25</sup> At-Talaq (65) : 4

muncul karena talak, dan talak muncul karena nikah.<sup>26</sup> Dasar pendapat ini sesuai dengan hadis *fi 'li* Nabi:<sup>27</sup>

عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت ست

سنين وبنى بي وأنا بنت تسع سنين

Menurut Ibnu Qudamah, disamping sebagai dalil bolehnya menikahkan gadis yang belum dewasa, hadis ini juga menunjukkan tidak adanya permintaan izin dari Abu Bakr (bapak/wali) kepada 'Aisyah

---

<sup>26</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi*, *op.cit* , h. 89

<sup>27</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet V (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IX: h. 202, “Kitab an-Nikah”, “Bab Tazwij al-Ab al-Bikr as-Sagirah, Sanad hadis ini marfu‘ muttasil, hadis diceritakan Yahya bin Yahya Abu Mu'awiyah dari Hisyam bin Urwah.

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Persetujuan Pernikahan Gadis Menurut Pemikiran Ibnu Rusyd

Wanita dalam istilah Arab terbagi menjadi dua status yakni gadis (*al-bikr*) dan janda (*as-sayyib*). Kedua status tersebut mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda dikalangan fuqaha'.

Ibnu Rusyd tidak berbeda dengan pendapat umum yang berlaku, yaitu gadis menjadi dua macam status adalah gadis yang sudah *baligh* dan gadis yang belum *baligh*.

Seperti biasanya bahwa ketika Ibnu Rusyd berpendapat tentang sesuatu hal, maka langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengemukakan pendapat ulama-ulama yang lain tentang hal tersebut dan sejumlah dalil, kemudian mengambil hukum dari dalil tersebut dan pendapat-pendapat ulama.

Di dalam kitabnya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* sebelum berbicara tentang persetujuan gadis dalam perkawinan ada sejumlah hadis yang beliau angkat dan pendapat ulama, seperti tertulis dalam bukunya *Bidayatul Mujtahid* diantaranya adalah :

حدثنا سفيان ان النبي صم قال: التيب احق بنفسها من وليها والبكر  
يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها

Dan riwayat lainnya :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صم : تستأمر  
اليتيمة في نفسها

Ada pemetaan menarik yang dibuat oleh Ibnu Rusyd tentang perbedaan pendapat ulama tentang kebebasan wanita dalam memilih pasangan yang dapat dirinci sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Para ulama sepakat bahwa untuk wanita janda diwajibkan ada persetujuannya.
2. Janda yang belum balig, menurut imam Malik dan imam Hanafi, wali boleh memaksanya untuk menikah, sedangkan menurut imam Syafi'i wali tidak boleh menikahkannya tanpa persetujuannya.
3. Mengenai gadis yang belum baligh, para imam mazhab sepakat bahwa ia boleh dinikahkan tanpa persetujuannya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang siapa yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya. Menurut Syafi'i yang boleh menikahkannya tanpa persetujuannya adalah bapak dan kakeknya, sedangkan imam Malik mengatakan yang boleh hanya bapaknya saja atau orang yang mendapat penyerahan dari bapak untuk melakukan akad itu jika calon suami telah ditentukan bapak, dan pendapat imam Hanafi adalah setiap orang yang mempunyai hak wali terhadap si gadis boleh

---

<sup>1</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 5

menikahkannya walaupun tanpa persetujuannya, akan tetapi setelah dewasa si anak gadis mempunyai hak *khiyar* (memilih).

4. Ulama berbeda pendapat tentang persetujuan sendiri itu jika wanitanya gadis dewasa. Imam Malik dan imam asy-Syafi'i berpendapat persetujuan hanya sekedar sunat, bahkan bapak sebagai wali bisa memaksa anak gadis untuk menikah dengan laki-laki pilihannya, sedangkan menurut imam Hanafi harus ada persetujuan dari si gadis.

Ibnu Rusyd dalam bukunya *Bidayah al-Mujtahid*, menyimpulkan bahwa perbedaan pendapat para ulama tentang perlu tidaknya persetujuan wanita dalam perkawinannya disebabkan adanya pertentangan antara *dalil khitab* dengan keumuman *dalil* tentang masalah diatas. Salah satu *dalil khitab* yang dimaksud adalah pemahaman dari hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صرم : تستأمر  
اليتيمة في نفسها

Artinya : “Dari Abu Huraira ra. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW  
bersabda : Gadis yatim dimintai persetujuan tentang dirinya.  
(HR.Abu Daud)<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Abi Daud , *op.cit*, h. 231

Menurut hadist di atas bisa dipahami bahwa gadis dewasa yang memiliki orangtua laki-laki (bapak) tidak dimintai pendapat, kecuali yang telah disepakati oleh jumhur ulama tentang permintaan pendapat seorang janda yang sudah dewasa. Dalil inilah yang dipegangi oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Sedangkan keumuman dalil, yang dimaksudkan adalah hadist riwayat Imam Muslim dari Sofyan sebagai berikut:

حدثنا سفيان ان النبي صم قال: التيب احق بنفسها من وليها والبكر يستأذنها ابوها في نفسها واذنها صماتها

Artinya : “ Sofyan menceritakan kepada kami, sesungguhnya Rasulullah SAW, berkata : Seorang janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya dan kepada gadis (bikru) itu dimintai persetujuan tentang dirinya oleh bapaknya dan diamnya adalah izinnya. (HR. Muslim)<sup>3</sup>

Hadist diatas merupakan ketentuan umum: yaitu lafadh “*al-bikru*” yang berlaku untuk semua gadis, maka setiap gadis harus dimintai pendapatnya. Ketentuan inilah yang dipegangi oleh Imam Hanafi, al Auza'i dan Abu Tsaur serta Ibnu Rusyd.

Dalam menanggapi masalah diatas, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa keumuman dalil lebih kuat untuk dipegangi daripada *dalil khitab*. Hal ini disebabkan bahwa keumuman dalil dalam hadis tersebut jika dilihat dari dalalah lafaznya termasuk kategori *manthuq*, sedangkan *dalil khitab* termasuk

---

<sup>3</sup> Muslim, *op.cit*, h.593-594

*mafhum*. Menurut ketentuan *tarjih*, apabila terjadi pertentangan antara *dalalah manthuq* dengan *mafhum* maka *dalalah manthuq* harus lebih didahulukan daripada *mafhum*.<sup>4</sup>

Dan juga pertentangan ulama akan hal tersebut bermuara pada ‘*illat* yang dipakai oleh para ulama itu sendiri. Dalam kaitan ini ada dua ‘*illat* yang dipakai ulama sebagai dasar argumennya yang masing-masing ‘*illat* mempunyai konsekwensi hukum yang berbeda. ‘*illat* yang dimaksud adalah kegadisan seorang wanita dan kedewasaannya.<sup>5</sup>

Ulama yang menggunakan ‘*illat* kedewasaan wanita sebagai dasar argumentasi, maka konsekwensi hukumnya adalah wanita dewasa tidak boleh dipaksa untuk menikah oleh siapa pun dan persetujuannya yang menentukan sah tidaknya suatu akad nikah. ‘*illat* inilah yang digunakan oleh imam Hanafi.<sup>6</sup>

Ulama yang menggunakan ‘*illat* kegadisan wanita, maka konsekwensinya adalah gadis dewasa boleh dipaksa walinya (bapak) untuk menikah. Jadi persetujuannya bukanlah sesuatu yang menentukan. Imam Syafi’i menggunakan ‘*illat* ini.<sup>7</sup>

Ada yang menggunakan kedua ‘*illat* tersebut sebagai satu kesatuan tanpa dipisah-pisah. Dengan kata lain, apabila ‘*illat* kebelumdewasaan dan

---

<sup>4</sup> Dr. Kasuwi Saiban, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, (Malang : Kutub Minar, 2005), cet.I, h. 241

<sup>5</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 4

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

kegadisan masih melekat pada diri seorang wanita maka ia tetap bisa dipaksa untuk menikah. Menurut pendapat ini, persetujuan seorang wanita menentukan dalam perkawinannya ketika ia sudah berstatus janda dan dewasa. *'illat* digunakan oleh imam Malik.<sup>8</sup>

## **B. Landasan Pemikiran Ibnu Rusyd Dan Metode *Ijtihad* Ibnu Rusyd**

### **a. Landasan pemikiran Ibnu Rusyd**

Sebelum penulis memperdalam pembahasan tentang bagaimana cara Ibnu Rusyd dalam ber-*ijtihad* untuk menghadapi studi-studi keislaman, terlebih dahulu penulis akan kemukakan berbagai metode *ijtihad* hukum Ibnu Rusyd secara global. Ibnu Rusyd yang sangat terkenal dengan salah seorang tokoh madzhab Maliki, dan ada beberapa pendapat beliau bertentangan dengan mazhabnya

Adapun corak pemikiran Ibnu Rusyd dalam meng-*istinbath*-kan hukum adalah sebagai berikut:

Dalam meng-*istinbath*-kan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, dia menjelaskan bahwa dalam ber-*ijtihad* dia menggunakan empat dasar pokok yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Ibnu Rusyd, *ad-Dharuri fi Ushul Fiqh aw Mukhtashar al-Mustashfa*, ( Beirut : Dar al-Gharbu al-Islamiy, 1994), h. 127



## 1. Nash

Nash yang dimaksud oleh Ibnu Rusyd adalah teks-teks al-Qur'an dan as-sunnah.<sup>10</sup> Menurutnya seorang ahli hukum jika menemukan suatu persoalan yang menghendaki pemecahan hukum, maka pertama-tama ia harus mencari jawaban persoalan tersebut kepada *nash*. Apabila ia mendapatkan *nash*, maka wajib menetapkan hukum berdasarkan *nash* tersebut.

Ibnu Rusyd mendahulukan teks-teks Hadis sebagai dasar/sumber hukum daripada *ijma'*, maupun *qiyas*.<sup>11</sup> Selanjutnya Ibnu Rusyd menjelaskan posisi *as-sunnah* terhadap al-Qur'an yang menurutnya ada tiga fungsi, yakni: pertama, *as-sunnah* menguatkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an; kedua, *as-sunnah* menjelaskan al-Qur'an dan sekaligus tafsir baginya; dan ketiga *as-sunnah* berdiri sendiri dalam menetapkan hukum

Metode yang digunakan oleh Ibnu Rusyd dalam memahami hukum dari *as-sunnah* pada dasar ada tiga : Lafazh, perbuatan dan ketetapan

---

<sup>10</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid ....*, *op.cit*, h. 3

<sup>11</sup> Sikap Ibnu Rusyd tersebut sesuai dengan para imam mazhab yang empat, yang juga mendahulukan teks-teks Hadis daripada pendapat mereka sendiri. Imam asy-Syafi'i misalnya, ia berkata:

إذا وجدت في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم

Dalam riwayat lain disebutkan :

وإذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي الخاطئ

Lihat M. Hasby ash-Shiddiqi, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 355-356

## 2. *Ijma'*

Unsur ketiga sebagai sumber *tasyri'* bagi Ibnu Rusyd adalah *ijma'*. *Ijma'* dalam pengertian bahasa memiliki dua arti. Pertama, berupaya (tekad) terhadap sesuatu.<sup>12</sup>

Pengertian kedua, berarti kesepakatan. Perbedaan arti yang pertama dengan yang kedua ini bahwa arti pertama berlaku untuk satu orang dan arti kedua lebih dari satu orang<sup>13</sup>, *Ijma'* dalam istilah ahli *ushul* adalah kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslimin dalam suatu masa setelah wafat Rasul SAW atas hukum syara'.<sup>14</sup>

Adapun rukun *ijma'* dalam definisi di atas adalah adanya kesepakatan para mujtahid kaum muslimin dalam suatu masa atas hukum *syara'*. 'Kesepakatan' itu dapat dikelompokkan menjadi empat hal:<sup>15</sup>

- a. Tidak cukup *ijma'* dikeluarkan oleh seorang mujtahid apabila keberadaanya hanya seorang (mujtahid) saja di suatu masa. Karena 'kesepakatan' dilakukan lebih dari satu orang, pendapatnya disepakati antara satu dengan yang lain.
- b. Adanya kesepakatan sesama para mujtahid atas hukum syara' dalam suatu masalah, dengan melihat negeri, jenis dan kelompok mereka. Andai yang disepakati atas hukum syara' hanya para mujtahid haramain, para mujtahid Irak saja, Hijaz saja, mujtahid ahlu Sunnah, Mujtahid ahli Syiah, maka secara syara' kesepakatan khusus ini tidak disebut *Ijma'*. Karena *ijma'*

---

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, h. 468

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> *Ibid*, h, 469

<sup>15</sup> Abdul Wahhab al-Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 45-46.

tidak terbentuk kecuali dengan kesepakatan umum dari seluruh mujtahid di dunia Islam dalam suatu masa.

- c. Hendaknya kesepakatan mereka dimulai setiap pendapat salah seorang mereka dengan pendapat yang jelas apakah dengan dalam bentuk perkataan, fatwa atau perbuatan.
- d. Kesepakatan itu terwujudkan atas hukum kepada semua para mujtahid. Jika sebagian besar mereka sepakat maka tidak membatalkan kesepakatan yang banyak secara *ijma'* sekalipun jumlah yang berbeda sedikit dan jumlah yang sepakat lebih banyak maka tidak menjadikan kesepakatan yang banyak itu *hujjah syar'i* yang pasti dan mengikat.

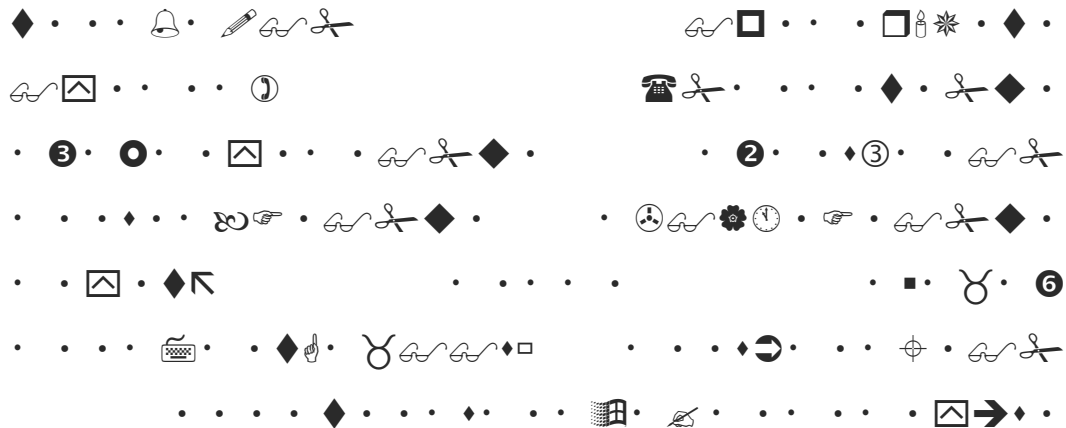
### 3. *Qiyas*

*Qiyas* menurut ulama ushul adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al Qur'an dan hadits dengan cara membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash. Mereka juga membuat definisi lain, *qiyas* adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dengan sesuatu yang ada nash hukumnya karena adanya persamaan '*illat* hukum.<sup>16</sup>

Dengan demikian *qiyas* itu penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang serupa karena prinsip persamaan '*illat* akan melahirkan hukum yang sama pula. Umpamanya hukum meminum khamar, nash hukumnya telah dijelaskan dalam Al Qur'an yaitu hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah Swt:

---

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, h. 173



Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah : 90)”

Haramnya meminum *khamr* berdasar ‘*illat* hukumnya adalah memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat di dalamnya ‘*illat* sama dengan *khamar* dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram.<sup>17</sup>

Berhubung *Qiyas* merupakan aktivitas akal, maka beberapa ulama berselisih faham dengan ulama jumhur. Pandangan ulama mengenai *Qiyas* ini terbagi menjadi tiga kelompok:<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Abdul Wahhab al-Khalaf, *op.cit*, h. 53

<sup>18</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op.cit*, h. 175

1. Kelompok jumhur, mereka menggunakan *Qiyas* sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al Qur'an, hadits, pendapat shahab maupun *ijma'* ulama.
2. Mazhab Zhahiriyyah dan Syiah Imamiyyah, mereka sama sekali tidak menggunakan *Qiyas*. Mazhab Zhahiri tidak mengakui *adal*-nya '*illat* nash dan tidak berusaha mengetahui sasaran dan tujuan nash termasuk menyingkap alasan-alasannya guna menetapkan suatu kepastian hukum yang sesuai dengan '*illat*. Sebaliknya, mereka menetapkan hukum hanya dari teks nash semata.
3. Kelompok yang lebih memperluas pemakaian *qiyas*, yang berusaha berbagai hal karena persamaan '*illat*. Bahkan dalam kondisi dan masalah tertentu, kelompok ini menerapkan *Qiyas* sebagai *pen-takhsih* dari keumuman dalil Al Qur'an dan hadits.

Perlu diketahui bahwa *Qiyas* yang dipakai oleh Ibnu Rusyd dalam proses pengambilan kesimpulan (dalil) terbagi dalam dua bagian, yaitu: *Qiyas* '*illat*, dan *Qiyas Syabah*.<sup>19</sup>

#### 1) *Qiyas* '*illat*

*Qiyas* ini terdapat dalam al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُكَذِّبِينَ ﴿١٣٧﴾

---

<sup>19</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 4

Artinya : ”*Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).*” (QS.Al-Imran : 137)<sup>20</sup>

Ayat ini menjelaskan, sebelum kamu terdapat umat-umat seperti kamu, maka perhatikanlah keburukan yang menimpa mereka, akibat mereka mendustakan ayat Allah dan para Rasul-Nya – umat sebelum kamu adalah *asal* (pokok), sedangkan kamu adalah *far'un* (cabang), sedangkan *'illat* (alasan) yang mengumpulkan adalah kedustaan, hukumnya adalah kehancuran (kebinasaan).

## 2) *Qiyas Syabah*

*Qiyas* jenis ini tidak digunakan oleh Ibnu Rusyd karena Allah hanya menggunakannya dalam menceritakan orang-orang yang berbuat kebatilan dan juga al-Qur'an memakainya dalam rangka penolakan atau untuk mencela seperti halnya analogi yang diambil oleh orang Musyrik.

## b. Metode *Ijtihad* Hukum Ibnu Rusyd

Aspek rasio yang diperlihatkan oleh Ibnu Rusyd dalam formulasi pemikirannya, terlihat dari sudut kajian hukum yang dituangkannya dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* dalam bentuk kajian komperatif dari beberapa pendapat dan pandangan ulama-ulama mazhab lainnya.

---

<sup>20</sup> Al-Imran (3) : 137

Dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* terdapat bentuk komparasi yang dipakai oleh Ibnu Rusyd : <sup>21</sup>

1. Dalam suatu pembahasan kadangkala Ibnu Rusyd cukup menjelaskan permasalahan yang disepakati dan yang diperselisihkan. Pada hal-hal yang diperdebatkan ia jelaskan pendapat masing-masing mazhab tanpa menyertai dengan dalil, kaidah *ushuliyah* dan logika berfikirnya. Cara seperti ini merupakan cara komperasi sederhana yang dilakukan oleh Ibnu Rusyd
2. Ibnu Rusyd hanya mengemukakan pendapat dan argumen masing-masing mazhab serta menjelaskan sebab terjadinya perbedaan tanpa memberikan penilaian dan tidak mengemukakan alternative baru.
3. Setelah mengemukakan pendapat dan alasan atau dalil yang dikemukakan oleh para ulama, Ibnu Rusyd juga memeberikan analisa, kritik dan koreksian terhadap salah satu pendapat dari pendapat yang ada. Kemudian pada masalah-masalah tertentu ia mengetengahkan pendapatnya sendiri.

Bentuk ketiga ini merupakan kerangka komperasi yang komperehensif yang digunakannya dalam menegaskan permasalahan persetujuan wanita dalam pernikahannya. Dan juga dalam hal ini, metode *istinbat* hukum yang digunakannya adalah *mantuq nas*, yaitu menggunakan keumuman dalil dari hadist yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sofyan : yaitu lafadh “*al-bikru*” yang berlaku untuk semua gadis, maka setiap gadis harus dimintai pendapatnya.

---

<sup>21</sup> Tesis atas nama Yuliar saifuddin, fiqh rasional (upaya Ibnu Rusyd dalam merekonstruksi syariah islam) PPs UIN SUSKA tahun 2000 jurusan PMDI

### C. Analisa penulis terhadap pemikiran Ibnu Rusyd.

Secara ideal-normatif, Islam sesungguhnya tidak membedakan antara pria dengan wanita, atau dengan kata lain Islam menolak segala bentuk diskriminasi yang berbau gender. Islam sebagai pembawa keselamatan dan kerahmatan bagi seluruh alam (*rahmatan lil'alam*) menempatkan derajat dan posisi wanita pada kedudukan yang mulia.

Wanita sebagai kenyataan sosial masyarakat Arab pada masa Nabi, menjadi salah *concren* yang ingin dibela al-Qur'an, disamping kelompok budak, kaum fakir miskin, - miskin, dan sederet kaum lemah lainnya. Bahkan al-Qur'an secara khusus mendokumentasikannya dalam satu surat khusus yang bernama an-Nisa',<sup>22</sup>

Sejumlah indikasi bisa diketengahkan untuk melihat pembelaan al-Qur'an terhadap wanita diantaranya:<sup>23</sup> *pertama*, ayat al-Qur'an yang secara tegas menyebutkan bahwa wanita dan laki-laki adalah sejajar seperti:<sup>24</sup>

هٰن لِبَاس لَكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاس لِهٰن

*Kedua*, sejumlah ayat yang secara tegas merombak kebiasaan Arab pra-Islam. Di antara indikasi tersebut adalah larangan mengubur hidup-hidup perempuan yang baru lahir, karena menurut masyarakat Arab pra-Islam

---

<sup>22</sup> Nurjanah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 5

<sup>23</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, cet. I (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2002), h. 3-4

<sup>24</sup> Al-Baqarah (2) : 187



perempuan itu akan mencemarkan nama baik keluarga. Prilaku ini jelas diprotes al-Qur'an.<sup>25</sup>

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ

*Ketiga*, larangan al-Qur'an mewariskan wanita, bahkan lebih dari itu Islam juga memberikan hak waris kepada wanita.<sup>26</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ

Hal ini merupakan bukti nyata bahwa al-Qur'an berusaha membebaskan wanita dari budaya yang mendiskriminasikannya. Karena harus diakui ketika al-Qur'an diturunkan rezim patriarki Arab masih sangat kental.<sup>27</sup>

Pembelaan al-Qur'an terhadap wanita tersebut menjadi salah satu misi pokok yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan agama Islam yang dibawanya. Akan tetapi bukti sejarah berkata lain, hampir sepanjang sejarah muslim, kaum wanita ditempatkan pada posisi *inferior* sementara laki-laki berada pada posisi *superior*. Padahal al-Qur'an menempatkan posisi wanita sejajar dengan laki-laki.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Al-An'am (6) : 151

<sup>26</sup> An-Nisa' (4) : 19 dan 7

<sup>27</sup> *ibid.*

<sup>28</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman...*, *op.cit.* h. 2

Munculnya praktek yang *inferior* terhadap wanita dalam sejarah muslim, bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan antara lain adanya sejumlah nash terkesan mengisyatkan adanya kemungkinan itu<sup>29</sup>. Di antaranya adalah:<sup>30</sup>

### للذكر مثل حظ الانثيين

Faktor lain yang menyebabkan munculnya praktek yang *inferior* terhadap wanita adalah pengaruh metode studi nash yang dipakai para ulama. Bisa dikatakan bahwa umumnya ulama tradisional, menggunakan pendekatan *parsial* dalam mengkaji al-Qur'an dan sunnah Nabi, Yaitu menyelesaikan satu masalah dengan cara memahami salah satu atau beberapa nash secara berdiri sendiri, tanpa menghubungkan dengannya dengan nash lain yang relevan.<sup>31</sup>

Salah satu fakta yang berbicara tentang praktek yang *inferior* terhadap wanita adalah hak kebebasannya dalam menentukan calon suami. Wanita dewasa yang masih gadis menurut mayoritas imam mazhab tidak mempunyai kebebasan untuk memilih pasangan dan hak itu sepenuhnya menjadi otoritas bapak sebagai wali. Padahal dengan kedewasaan seorang wanita mungkin ia untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikirannya. Dan dengan kedewasaan itu pula seorang wanita memiliki kapasitas untuk melaksanakan apa yang ada dalam pikirannya.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>30</sup> An-Nisa' (4) : 11

<sup>31</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlurrahman....op.cit*, h. 9

<sup>32</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001), h. 83-84

Pendapat mayoritas imam mazhab tersebut bila diteliti lebih jauh masih merupakan peninggalan tradisi arab pra Islam. Sejarah menuliskan bahwa sebelum kedatangan Islam, seorang bapak memiliki hak untuk memilihkan suami bagi putrinya dan putrinya tidak berhak untuk menentang. Bahkan tradisi Arab pra Islam yang tidak menghargai hak wanita adalah tidak jarang para bapak saling menukar putri mereka untuk menikah satu sama lain. Ini dikenal dengan nikah *syigar* dalam Islam, akan tetapi kemudian nikah dengan jenis seperti ini dibatalkan sekaligus diharamkan oleh Islam.

Sebelum memberikan penilaian lebih jauh dalam persoalan ini, ada baiknya penulis menguraikan bagian-bagian yang menjadi ruang perdebatan para ulama dalam membahas kajian ini, agar memperoleh pemahaman yang konprehensif tentang persoalan ini.

Salah satu Bagian yang menjadi perdebatan berkaitan dengan hak wanita dalam memilih pasangan adalah '*illat* yang dijadikan sebagai dasar argumen untuk menentukan ada tidaknya hak kebebasan itu sendiri. Sebagian ulama dalam kaitan ini menjadikan kegadisan (*al-bikr*) sebagai '*illat* dalam penentuan hukumnya, sementara ulama yang lain dengan menggunakan '*illat* masa kecil (*as-sugr*), bahkan ada ulama yang menjadikan '*illat* bagi kasus ini dengan menggabungkan kedua '*illat* tersebut.<sup>33</sup>

Dalam kasus ini, ada kritikan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah, yang menyatakan bahwa sesungguhnya menjadikan kegadisan sebagai alasan yang mewajibkan untuk membatasi hak wanita adalah bertentangan dengan prinsip

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, h. 5

Islam, dan menjadikan hal itu sebagai *'illat* untuk membatasi atau menghalangi kaum wanita merupakan pembuatan *'illat* dengan sesuatu sifat yang tidak ada pengaruhnya dalam syara'.<sup>34</sup> Beliau menambahkan bahwa *'illat* yang benar untuk kasus ini adalah masih kecil

Ibnu Rusyd sependapat dengan gurunya Ibn Taimiyyah bahwa *'illat* yang dijadikan sebagai pijakan hukum ada tidaknya hak tersebut adalah *'illat* usia kecil, sehingga menurut beliau gadis yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih calon suaminya. Dengan kata lain tidak seorang pun yang bisa memaksanya untuk menikah.

Bagian lain yang menjadi dasar perbedaan pendapat para ulama dalam kaitan ini adalah metode para ulama dalam meng-*istinbat*-kan hukum pada kasus ini. Dengan metode *istinbat* hukum yang berbeda tersebut berimplikasi kepada penetapan hukum yang berbeda pula walaupun pada dasarnya nash yang digunakan sama. Metode *istinbat* hukum yang digunakan para ulama ada dua macam dalam hal ini yaitu *mafhum mukhalafah* dan *mantuq nas*.

*Mafhum mukhalafah* sebagai pisau analisis digunakan oleh imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali terhadap kasus ini, membawa mereka pada pendapat bahwa persetujuan gadis hanya sekedar sunat dengan berdasarkan hadis<sup>35</sup>

الايم احق بنفسها من وليها

---

<sup>34</sup> Dikutip oleh Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 471

<sup>35</sup> Imam an-Nawawi, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet V (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IX: 202, "Kitab an-Nikah", "Bab *Isti'zan fi an-nikah bi an-Nutq wa al-Bikr bi as-Sukut*". Sanad hadis ini *marfu' muttasil*, hadis dari Sa'id bin Mansur dan Qutaibah bin Sa'id diceritakan Sufyan diceritakan Jiyad bin Sa'ad.

Jika janda lebih berhak terhadap dirinya dari pada walinya, maka *mafhum mukhalafahnya* adalah wali lebih berhak terhadap diri gadisnya, sehingga kemudian mereka berpendapat meminta persetujuan seorang gadis tidak diperlukan lagi.

Dengan hadis yang sama pula ulama yang berpegang pada *mantuq nas* diwakili oleh imam Hanafi dan Ibnu Rusyd, yang menyatakan bahwa persetujuan gadis adalah wajib.

Ibnu Rusyd lebih lanjut mengkritik golongan yang menggunakan *mafhum mukhalafah* terhadap kasus ini dengan mengatakan bahwa pemahaman yang muncul dari *mantuq nas* semestinya didahulukan daripada pemahaman yang menggunakan *mafhum mukhalafah*. Sebab penetapan hukum suatu kasus tertentu belum tentu menetapkan hukum sebaliknya untuk kasus lainnya. Adalah sesuatu yang mungkin kasus lain mempunyai dasar hukum sendiri.<sup>36</sup>

Perbedaan pendapat berkenaan dengan persoalan persetujuan gadis dalam perkawinan, Ibnu Rusyd lebih lanjut memberikan analogi bahwa seorang bapak tidak memiliki hak *tasarruf* terhadap harta milik gadisnya yang *rasyidah* tanpa persetujuannya, apalagi terhadap *budu'*-nya (kehormatannya) yang merupakan hartanya yang paling berharga. Lalu, bagaimana mungkin seorang bapak dibolehkan men-*tasarruf*-kan harta yang paling berharga tersebut sementara si gadis tidak setuju. Pada akhirnya persoalan pada kebebasan dan persetujuan wanita dalam memilih calon suami, bermuara pada apakah perlu (wajib) atau tidak (sunnah).

---

<sup>36</sup> Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang op.cit*, h. 92

Ibnu Rusyd sebagai salah satu ulama besar dalam lingkungan mazhab Maliki, dalam menyikapi persoalan ini lebih sepakat dengan pandangan Abu Hanifah.<sup>37</sup> Beliau berpendapat dalam hal ini sebagai sesuatu yang diperlukan (wajib). Dengan pertimbangan kemaslahatan gadis yang bersangkutan, maka hal ini diserahkan sepenuhnya kepada si gadis dan bukan kepada wali.

Bisa dianalogikan bahwa untuk sahnya transaksi bisaa saja harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu, bagaimana mungkin akad nikah, satu transaksi yang melebihi transaksi yang bisaa dapat dilakukan dengan paksa (tanpa persetujuan si gadis) dapat dilakukan. *Kedua*, perkawinan dalam Islam mempunyai tujuan yang sangat mulia dan melahirkan akibat-akibat hukum yang cukup luas. Sebab akad nikah merupakan langkah awal untuk menentukan nasib para pasangan (hidup sebagai suami istiri) selama hidup di dunia. Oleh karena itu, semakin jelas bahwa mestinya akad nikah dillakukan pihak-pihak dengan penuh kesadaran dan pertimbangan matang. Tuntunan ini semakin menunjukkan, bahwa keputusan mempelai sebagai pihak-pihak yang merasakannya akibat kelak harus benar-benar mendapatkan perhatian.

Perkawinan berkaitan langsung dengan perasaan wanita, dialah nanti yang akan merasakan manis indah maupun pahit getirnya perkawinan. Oleh karena itu

---

<sup>37</sup> Barangkali inilah bukti konkrit sekaligus implikasi dari perkataan beliau. Ibn Qayyim pernah berkata bahwa sepantasnyalah seorang mufti tidak memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa kepadanya, sesuai dengan pendapat mazhab yang diikutinya. Sementara dalam permasalahan tersebut, ia mengetahui bahwa pendapat dari mazhab lain lebih unggul dibandingkan pendapat mazhabnya atau ia mengetahui sandaran dalil yang dimilikinya lebih shahih. Dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, cet I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003), h. 148

persetujuan dan kebebasannya dalam menentukan calon pendampingnya adalah sesuatu yang menentukan dalam perkawinan.

Islam menggariskan salah satu misi utamanya adalah memperjuangkan hak-hak wanita, maka pandangan yang relevan dalam persoalan ini adalah memberikan hak kepada wanita untuk memilih pasangan mereka. Ini akan menunjukkan kemerdekaan pribadi mereka yang “direnggut” secara sadar atau tidak oleh tradisi yang mengelilinginya.

Berdasarkan hak-hak ke-Islam-annya, seorang gadis dewasa dapat menolak siapa saja yang ia anggap tidak memenuhi syarat sebagai suaminya. Tidak yang dapat memaksakan perkawinan kepadanya. Maka jika dikatakan bahwa apabila ia tidak setuju dengan pernikahan yang disodorkan kepadanya, maka perkawinan itu tidak sah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, *Fiqih munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia , 1999)
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdallah*, cet. VII (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999)
- Al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Ibnu Rusyd: Sang filsuf, Mistikus, Faki, dan Dokter*, terj. Khalifurrahman Fath, (Jogjakarta: CV Qolam, 2003)
- Al-Jaziri, Abdul ar-Rahman, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Afkar, t.t.), juz. IV
- Al-Khalaf, Abd. Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Halimuddin, S.H, (Jakarta: PT.Rineka Cipta,1993) cet.II
- Al-Mugniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. dkk.cet V (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2000)
- An-Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Syarhi an-Nawawi*, cet V (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), juz. IX
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986)
- Ash-Shiddiqie, M. Hasby, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- \_\_\_\_\_, *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadist*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1981)
- Asy- Syauckani, *Nailul 'Authar Syarh Muntaqal Akhbar*, (Libanon: Daar al- Fikr, 1973), Juz VI
- Asy'ari, Abu Hasan, *Ibnu Rusyd* (Jakarta : Diah Rakyat, 2009 )
- Bukhari, *al-Jami'u as-Shahih*, (Mesir : al-Halaby, tth), Juz II
- Daud, Abi, *Sunan Abi Daud*, (Beirut : Dar al-Fikr, tth), Jilid II
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar Filsafat Islam*, cet. VI,( Jakarta: PT Bulan Bintang, 1996)
- Hidayat, A, *Pemikiran Islam tentang Teologi dan Filsafat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2006)



- Ibn Sawrah, Abi 'Isa Muhammad, *Sunan at-Tirmizi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), juz. III
- Ismail, Nurjanah, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-Laki dalam Penafsiran*, cet. I (Yogyakarta: LKiS, 2003)
- Mansur, Abd al-Qadir, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta : Zaman, 2009)
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiyai Atas Wacana Agama Dan Gender*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)
- Muslim , *Shahih Muslim*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyyah, tth), Juz II
- Mustofa, A, *Filsafat Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004)
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlurrahman Tentang Wanita*, cet. I (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2002)
- \_\_\_\_\_, *Islam: Tentang Relasi Suami Dan Istri*, cet. I, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004)
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2004), cet. I
- Qaradhwani, Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi Dengan Peninggalan Ulama Salaf*, alih bahasa Ahrul Tsani Fathurrahman dan Muhtadi Abdul Mun'im, cet I (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003)
- \_\_\_\_\_, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, alih bahasa As'ad Yasin, cet. II (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), juz. II
- Qudamah, Ibnu , *al-Mughni*, (t.t, Maktabah al-Jumhuriyyah al-'Arabiyyah,tth), juz VI
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2003)
- Rusyd, Ibnu, *ad-Dharuri fi Ushul Fiqh aw Mukhtashar al-Mustashfa*, ( Beirut : Dar al-Gharbu al-Islamiy, 1994)
- \_\_\_\_\_, *Bidayatul Muftahid Wa Nihayatul Muftashid*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2002), Juz II
- Saiban, Kasui, *Metode Ijtihad Ibnu Rusyd*, (Kutub Minar, 2005)
- Saifuddin, Yuliar, Tesis : *Fiqh Rasional* (upaya Ibnu Rusyd dalam merekonstruksi syariah islam) PPs UIN SUSKA tahun 2000 jurusan PMDI

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), cet. V

Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* , Cet. III (Jakarta: PT. LOGOS, 2001), juz.II

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh Islami*, (Beirut: Dar al-Fikri, tth)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas tentang persetujuan anak gadis dalam pernikahan menurut Ibnu Rusyd, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ibnu Rusyd berpendapat dalam persoalan ini berpendapat bahwa wanita yang diakui izinnya dalam pernikahan adalah wanita dewasa, tidak boleh dinikahkan kecuali dengan persetujuannya. Ia bersikukuh bahwa sigadis dewasa tersebut tetap harus dimintai persetujuan ketika akan menikahkannya. Dan pendapat beliau itu sependapat dengan Imam Hanafi, al-Auza'i, dan Abu Tsaur, bahwa dalam pernikahan seseorang gadis dewasa harus dimintai persetujuannya, akan tetapi berbeda status hukumnya dengan gadis yang masih kecil.
2. Landasan yang dipakai Ibnu Rusyd dalam kasus ini menggunakan keumuman *dalil*, yang dimaksudkan adalah hadist riwayat Imam Muslim dari Sofyan merupakan ketentuan umum, yaitu lafadh "*al-bikru*", yang berlaku untuk semua gadis. Ibnu Rusyd berpegang kepada *mantuq nas* yang dikuatkan dengan menggunakan '*illat* kedewasaan (*baligh*), sedangkan mayoritas fuqaha' berpegang kepada *mafhum mukhalafah* yang dikuatkan dengan menggunakan '*illat* kegadisan (*bikru*).

## B. Saran-Saran

1. Dalam memahami persoalan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya hendaknya tidak dipahami secara *parsial* sehingga pemahaman yang muncul sesuai dengan cita-cita syari'ah untuk mewujudkan *masalah* di tengah-tengah manusia dapat dirasakan.
2. Ada satu tambahan menarik dari Ibnu Rusyd, yaitu ketika memberikan kebebasan kepada anak gadis untuk menentukan calon suaminya, disamping dengan syarat dewasa beliau juga menambahkan syarat yang dipenuhi si gadis yaitu si gadis mesti *rasyidah*. Parameter yang bisa digunakan untuk mengukur sejauh mana *rasyidah* yang dimiliki seorang gadis tersebut adalah dengan melihat sejauh mana pendidikan yang diperolehnya. Dengan pendidikan yang diperolehnya diharapkan si gadis lebih siap menghadapi problem-problem yang muncul dalam rumah tangganya. Alangkah baiknya dalam hal ini, pemerintah membuat semacam peraturan batas jenjang pendidikan yang telah diikuti si gadis maupun calon suaminya ketika akan menikah.
3. Penelitian berkaitan dengan persetujuan anak gadis dalam pernikahannya sebagaimana dilakukan penyusun dalam kesempatan ini masih terbuka bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Selain karena dalam penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh yakni Ibnu Rusyd, studi ini belum cukup untuk ukuran penelitian yang sempurna.